

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI FILIPINA  
PADA MASA PEMERINTAHAN RODRIGO DUTERTE  
TENTANG LAUT CINA SELATAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

**Oleh :**

**JENNIFER BEATRICE G. P.**

**E 131 13 308**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI FILIPINA PADA MASA  
PEMERINTAHAN RODRIGO DUTERTE TENTANG LAUT  
CINA SELATAN

N A M A : JENNIFER BEATRICE G.P

N I M : E 131 13 308

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

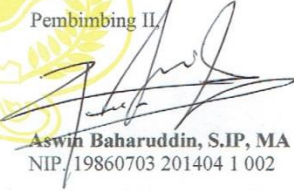
Makassar, 2 Maret 2017

Mengetahui :


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Drs. Patrice Lumumba, MA  
NIP. 19611012 198701 1 001

  
Aswin Baharuddin, S.IP, MA  
NIP. 19860703 201404 1 002

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

  
H. Darwis, MA, Ph.D  
NIP. 19620102 199002 1 003



## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI FILIPINA PADA MASA  
PEMERINTAHAN RODRIGO DUTERTE TENTANG LAUT  
CINA SELATAN

N A M A : JENNIFER BEATRICE G.P

N I M : E 131 13 308

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh  
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu,  
1 Maret 2017

TIM EVALUASI

Ketua : Drs. Patrice Lumumba, MA

Sekretaris : Burhanuddin, S.IP, M.Si

Anggota : 1. Seniwati, Ph.D

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3.

## ABSTRAK

Jennifer Beatrice Glorianna Putri, E131 13 308. **“Kebijakan Politik Luar Negeri Filipina Pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte tentang Laut Cina Selatan”**, dibawah bimbingan **Patrice Lumumba**, selaku Pembimbing I, dan **Aswin Baharuddin**, selaku Pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte, khususnya tentang Laut Cina Selatan. Di mana, pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, kebijakan politik luar negeri Filipina mengalami perubahan dari kebijakan pada pemerintahan Presiden sebelumnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode telaah pustaka (*library research*), yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, surat kabar harian, dan internet yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang menganalisa latar belakang dan bagaimana wujud kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte tentang Laut Cina Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Presiden Rodrigo Duterte dalam kebijakan politik luar negerinya, lebih bersikap kooperatif daripada konfrontatif terhadap RRT, dalam menangani konflik Laut Cina Selatan. Wujud lain dari kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte, khususnya mengenai Laut Cina Selatan, adalah berorientasi pada kepentingan ekonomi. Selain itu, perubahan kebijakan politik luar negeri Filipina dimaksudkan untuk menjaga stabilitas kawasan sekitar Laut Cina Selatan dan mewujudkan kepentingan nasional Filipina, serta menjadi negara yang mandiri, maka Presiden Rodrigo Duterte mengambil langkah untuk bertindak secara kooperatif dengan RRT dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk membangun hubungan dengan negara mana saja, demi kepentingan nasional Filipina, khususnya dalam bidang ekonomi.

*Kata Kunci: Kebijakan Politik Luar Negeri, Filipina, Political Personality, Rodrigo Duterte, Laut Cina Selatan, RRT.*

## ABSTRACT

Jennifer Beatrice Glorianna Putri, E131 13 308. **“The Philippine’s Foreign Policy Under Rodrigo Duterte About South China Sea”**, under the guidance of **Patrice Lumumba**, as the First Advisor, and **Aswin Baharuddin**, as the Second Advisor, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to describe the Philippine’s foreign policy, especially in regarding to the South China Sea, that under the administration of President Rodrigo Duterte, the foreign policy show an alteration from the previous administration.

The method of this research is analytical descriptive that aims to describe the facts about the Philippine’s foreign policy under the administration of President Rodrigo Duterte. Technique of data collection that used by the writer is library research, taken from many literatures, such as books, journals, articles, newsletters, and internet, that related to this research. In this research, the writer also use qualitative technique of data analysis, that analyze background and the shape of the Philippine’s foreign policy under the administration of President Rodrigo Duterte, about the South China Sea.

The result of this research shows that President Rodrigo Duterte in his foreign policy, act cooperatively toward the People’s Republic of China, regarding to the conflict in the South China Sea. Another shape of the Philippine’s foreign policy under the administration of President Rodrigo Duterte, especially about South China Sea, is oriented to the interest of the economy. Beside that, the change of the Philippine’s foreign policy aims to keep the stabilization of the region around the South China Sea and fulfill the Philippine’s national interest, also become a country that not depend on other country, then President Rodrigo Duterte acts cooperatively with the People’s Republic of China and take advantage in every opportunities to build relation with every country, to fulfill national interest of the Philippine’s, especially in economic sector.

*Key words: Foreign Policy, The Philippines, Political Personality, Rodrigo Duterte, South China Sea, the People’s Republic of China.*

## KATA PENGANTAR

*“I can do all things through Him who strengthens me.” (Philippians 4:13)*

*“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” (Filipi 4:13)*

Puji Tuhan, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dengan judul, **“Kebijakan Politik Luar Negeri Filipina pada Masa Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi sarjana Ilmu Hubungan Internasional. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, papi (Samuel), dan mami (Anneke), terima kasih untuk semua doa, dukungan, dan perjuangan yang telah papi dan mami berikan, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan ini, semua karena doa-doa dan campur tangan dari kedua orang tua penulis yang luar biasa. Sekali lagi, terima kasih untuk kedua orang tua penulis, apa yang penulis kerjakan, biarlah itu dapat kembali kepada kedua orang tua penulis dan menyenangkan hati mereka. Tuhan Yesus memberkati.

2. Keluarga besar penulis, dari kedua pihak orang tua penulis, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam berbagai bentuk. Penulis merasa sangat diberkati dan terbantu dengan semua dukungan dan doa yang diberikan. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya.
3. GIG (Green Impact Generation), sebagai keluarga penulis di dalam Tuhan. Terima kasih untuk semua dukungan dan doa yang diberikan seluruh GIG kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Terima kasih secara khusus untuk Mam Magda, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dan juga kepada teman-teman leader yang selalu setia mendukung dan mendoakan, Tuhan Yesus memberkati.
4. Petra Youth, terima kasih untuk Ayah Eli dan Bunda Syanne, yang selalu mendoakan kami, anak-anaknya di Petra Youth. Terima kasih untuk semua kakak-kakak Petra Youth yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun penulis sangat berterima kasih untuk semua doa dan dukungan, Tuhan Yesus memberkati.
5. Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA, selaku pembimbing I yang tidak pernah jemu-jemu menyambut kami untuk datang mendapatkan bimbingan langsung dari Bapak. Terima kasih untuk bimbingannya Pak, dan untuk semua yang telah Bapak korbankan untuk kami anak bimbingannya. Semoga Pak Patrice bersama keluarga sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Aswin Baharuddin, S.IP, MA, selaku pembimbing II, yang lebih akrab di sapa kak Aswin. Terima kasih kak untuk

waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk setiap masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kak, semoga kak Aswin bersama keluarga sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan.

6. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Bapak H. Darwis, MA, Ph.D yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya dan juga Sekretaris Jurusan, Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si, serta seluruh staf pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, yang telah berperan penting dalam proses pendidikan penulis ini dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk semua ilmu, masukan, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Kiranya selalu mendapat lindungan dari Tuhan.
7. Bapak Dekan, Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si, beserta seluruh jajarannya, terima kasih untuk setiap bantuan dan dukungan bagi kami mahasiswa-mahasiswi, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
8. Bunda Naharia, SE dan kak Rahma, SE di Sekretariat Jurusan HI. Terima kasih untuk jerih lelahnya dalam membantu persiapan ujian. Sehat selalu Bunda dan Kak Rahma, semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
9. Ibu Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, beserta seluruh jajarannya, terima kasih untuk setiap usaha dan pengabdianya dalam mengusahakan pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa-mahasiswinya di Universitas Hasanuddin. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan.



10. *Iron Ladies*, Nuryanti Awallia, Puji Chayrani, Sitti Mardhiyah Rani, Tifanny Nanda Nartari, Dhea Angela, terima kasih sudah menjadi saudari-saudari dalam berbagai suka dan duka di bangku perkuliahan. Terima kasih untuk semua dukungan, doa, dan semua cerita yang mengisi kehidupan perkuliahan penulis. Semoga persahabatan ini tetap terjaga sampai di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kalian semua.
11. Teman-teman seperjuangan, *Lost in Maros*, Mashita Dewi Tidore, Rani Purwani Ramli, Nuryanti Awallia, Ardi Riyanti Rum, terima kasih untuk waktu-waktu perjuangan yang sudah terlewati bersama. Puji Tuhan, semuanya membuahkan hasil yang terbaik untuk semuanya. Sukses untuk semuanya, Tuhan memberkati.
12. SEATTLE 2013, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk semua teman-teman SEATTLE yang luar biasa. Terima kasih untuk waktu dan moment yang dilewati bersama. Semoga kekompakan SEATTLE terus terjalin, walaupun akan berpisah satu dengan yang lain. Sukses untuk semua teman-teman SEATTLE.
13. PMKO, terima kasih untuk semua doa dan dukungan dari seluruh PMKO. Terima kasih sudah menjadi wadah bagi-anak-anak Tuhan untuk bersekutu bersama di tengah pendidikan yang ditempuh. Tuhan sendiri yang akan membalas setiap jerih payah dari semua pengurus PMKO yang akan terus mengalami regenerasi. Tuhan memberkati kalian semua.
14. Teman-teman Posko Atas Awan, terima kasih untuk waktu-waktu yang tidak akan terlupakan selama di Bantaeng. Terima kasih untuk dukungan dan doanya

selama penulis menulis skripsi. Tuhan memberkati kalian semua, semoga selalu dalam lindungan-Nya.

Akhir kata, penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung, mendoakan, memberi semangat, dan memberi bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kasih karunia-Nya dan berkat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan juga bagi pengembangan keilmuan, khususnya di bidang Hubungan Internasional. Penulis juga menyadari, masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan menerima kritik maupun saran, yang dapat dikirimkan melalui alamat email penulis, [beatrice.glorianna@gmail.com](mailto:beatrice.glorianna@gmail.com) .

Makassar, Maret 2017

Penulis,

Jennifer Beatrice Glorianna Putri

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Ii
ABSTRAK.....	Iii
ABSTRACT.....	Iv
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR GAMBAR.....	Xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Konsep tentang Kebijakan Politik Luar Negeri.....	16
B. Konsep <i>Political Personality</i> .....	24
C. Konsep Kawasan.....	38
BAB III KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI PRESIDEN RODRIGO DUTERTE DAN LAUT CINA SELATAN	44
A. Kebijakan Politik Luar Negeri Presiden Rodrigo Duterte.....	44
1. Dasar Kebijakan.....	45
2. Tujuan Kebijakan.....	58
B. Laut Cina Selatan.....	64
1. Potensialitas Laut Cina Selatan.....	66
2. Nilai Strategis Laut Cina Selatan.....	69
BAB IV WUJUD KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI PRESIDEN RODRIGO DUTERTE.....	73
A. Kooperatif.....	73
B. Orientasi Kepentingan Ekonomi.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Klaim Tumpang Tindih Laut Cina Selatan.....	65
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara yang merdeka dan berdaulat akan menjalankan kebijakan politik luar negerinya dalam dunia internasional. Kebijakan politik luar negeri suatu negara mencerminkan kepentingan nasional negara tersebut. Dalam kaitannya dengan kepentingan nasional, kebijakan politik luar negeri suatu negara diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan nasional negaranya dengan tepat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintahan yang berkuasa dalam negara tersebut.

Filipina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat ikut aktif dalam kancah politik internasional melalui politik luar negerinya. Filipina telah melewati perjalanan panjang dalam politik luar negerinya yang merupakan cerminan dari kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Filipina tidak lepas dari sejarah panjang negara Filipina sejak semula. Filipina yang pernah berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat, masih membawa pengaruh nilai-nilai Amerika Serikat yang tertanam sejak dahulu. Bahkan, Filipina menjalin kerjasama yang baik dengan Amerika Serikat dengan mengizinkan tentara Amerika Serikat memiliki pangkalan dan melakukan pelatihan militer di wilayahnya, yaitu di Mindanao. Kecenderungan politik luar negeri Filipina pun banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial Amerika Serikat.

Berbeda dengan hubungan Filipina dan Amerika Serikat, hubungan antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) cenderung kurang baik dan seringkali diwarnai dengan ketegangan di antara keduanya. RRT tidak memiliki kedekatan langsung dengan rakyat Filipina, baik dalam budaya, militer, dan hal lainnya, seperti yang dimiliki antara Filipina dan Amerika Serikat. Ditinjau dari bidang keamanan, dan ekonomi, Filipina cenderung membangun hubungan dengan Amerika Serikat daripada dengan RRT.<sup>1</sup> Selain itu, hubungan Filipina dan RRT seringkali memburuk diakibatkan oleh perebutan wilayah Laut Cina Selatan, yang melibatkan RRT dan 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Vietnam, Brunei, serta Filipina.

Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan di dunia yang memiliki potensi yang sangat besar, karena kaya akan minyak bumi, gas alam, dan sumber daya laut lainnya, yang menjadi kebutuhan setiap negara di dunia. Hal ini menyebabkan negara-negara di sekelilingnya berusaha mendapatkan hak kedaulatan atas wilayah yang masing-masing di klaim oleh negara-negara tersebut. Hal ini jugalah yang kemudian memicu terjadinya klaim tumpang tindih dan konflik di antara negara-negara yang bersangkutan.

Laut Cina Selatan telah menjadi perdebatan panjang antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Kawasan Laut Cina Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan yang dapat memicu konflik, karena

---

<sup>1</sup> Emmanuel Yujuico. 2012. *The Philippines*. Hal. 66. Diunduh dari <http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR015/SR015-SEAsia-Yujuico-.pdf>.

banyaknya sengketa wilayah di dalamnya.<sup>2</sup> Selain karena potensinya yang besar, Laut Cina Selatan juga memiliki nilai yang sangat strategis, karena merupakan jalur perdagangan dunia internasional. Hal inilah yang menambah keinginan masing-masing negara untuk memiliki hak kedaulatan atas masing-masing wilayah yang diklaimnya, termasuk Filipina dan RRT.

Hubungan Filipina dan RRT memburuk pada beberapa tahun belakangan ini, yaitu pada masa pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino III, dikarenakan konflik Laut Cina Selatan tersebut. Pada tahun 2013, konflik antara kedua negara terkait Laut Cina Selatan semakin memanas. Kementerian Pertahanan Filipina menjumpai 75 blok beton tergeletak di gugusan karang Scarborough Shoal. Pemerintah Filipina saat itu menilai blok beton tersebut adalah salah satu upaya RRT untuk menduduki kepulauan itu.<sup>3</sup>

Filipina, pada masa pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino III, kemudian membawa konflik ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional, yang berbasis di Den Haag, Belanda. Hal itu memicu kemarahan Pemerintah RRT yang lebih memilih untuk menyelesaikan perselisihan dengan diskusi bilateral.

Sebagai hasilnya, pada akhir masa pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino III di tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan bahwa RRT telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan, yang kemudian menambah kemarahan RRT. RRT bersikeras tidak menyetujui keputusan tersebut dan

---

<sup>2</sup> Dewi Fortuna Anwar. 2008. *Masalah Keamanan Tradisional di Lingkungan ASEAN dalam Isu-isu Keamanan Strategis dalam Kawasan ASEAN*. Jakarta: LIPI Press. Hal. 46.

<sup>3</sup> Harian Kompas. *Filipina Panggil Pulang Duta Besar di China*. 06 September 2013. Hal. 9.

meminta Filipina melakukan perundingan secara langsung dengan RRT terkait konflik Laut Cina Selatan tersebut.<sup>4</sup>

Filipina merupakan negara yang sangat bergantung pada peran Presiden sebagai pembuat keputusan dan kebijakan. Pengaruh kepemimpinan dalam perumusan kebijakan politik luar negeri merupakan hal yang sangat penting dan menentukan arah kebijakan politik luar negeri Filipina selanjutnya. Kepribadian, pengalaman, dan pengetahuan sang Presiden akan mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang diambilnya.

Memasuki masa pemerintahan yang baru, Filipina dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte, sebagai Presiden Filipina ke-16. Kebijakan setiap periode pemerintahan akan berbeda dan terus mengalami perubahan, karena gagasan, pemikiran dan juga kepribadian masing-masing pemimpin berbeda. Kebijakan politik luar negeri Filipina juga terbentuk berdasarkan keadaan atau situasi negara pada saat tertentu, serta dipengaruhi oleh tindakan atau kebijakan negara lain yang berhubungan dengan Filipina.

Filipina menghadapi fase baru dalam politik luar negerinya dengan terjadinya pergantian pemerintahan dari Benigno Aquino III ke Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina yang baru. Kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte memiliki arah dan tujuan yang semuanya mengarah kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, serta kemajuan negaranya.

---

<sup>4</sup> Pars Today. *Pemerintahan Baru Filipina dan Tantangannya*. 2016. Terdapat dalam [http://parstoday.com/id/radio/world-i14899-pemerintahan\\_baru\\_filipina\\_dan\\_tantangannya](http://parstoday.com/id/radio/world-i14899-pemerintahan_baru_filipina_dan_tantangannya). Diakses pada 1 Desember 2016.



Presiden Rodrigo Duterte mengutamakan kepentingan nasional negaranya dan menggaris bawahi beberapa permasalahan domestiknya yang perlu diatasi dengan segera karena dianggap telah menyusahkan negara Filipina.

Presiden Rodrigo Duterte, yang sebelumnya adalah walikota Davao, Mindanao, Filipina, memperlihatkan perubahan kebijakan yang mencolok sejak awal pemerintahannya sebagai Presiden Filipina. Dimana, Presiden Duterte memulai masa pemerintahannya dengan menegakkan hukum yang tegas kepada pelaku-pelaku tindakan kriminal di Filipina, juga berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan RRT.

Jika mantan Presiden Benigno Aquino III bersikap keras dalam politik luar negerinya terhadap RRT, terutama mengenai konflik Laut Cina Selatan, maka Presiden Rodrigo Duterte menempuh jalur yang lebih bersifat damai, dengan mengatakan akan membicarakan konflik Laut Cina Selatan secara bilateral dengan RRT. Presiden Rodrigo Duterte tidak ingin menyelesaikan konflik ini melalui pengadilan internasional. Hal ini menunjukkan titik awal perubahan kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

Membangun hubungan yang baik dengan RRT, merupakan langkah awal kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte yang mencolok dan berbalik arah dari pendahulunya. Tindakan ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan mantan Presiden Benigno Aquino III.<sup>5</sup> Selain itu, Presiden Rodrigo Duterte juga

---

<sup>5</sup> Rene L. Pattiradjawane. *Dilema Keamanan Maritim: Protokol CUES Ubah Status Laut Selatan*. Harian Kompas. 03 Oktober 2016. Hal. 10.

melakukan peralihan orientasi kebijakan politik luar negeri Filipina yang menjauhi Amerika Serikat, dengan mengusir tentara Amerika Serikat yang melakukan pelatihan di Mindanao, serta berusaha menjauhkan Amerika Serikat dari sengketa teritorial tersebut.<sup>6</sup>

Perubahan kebijakan yang terjadi di Filipina, tidak lepas dari pengaruh kepemimpinan dalam pembentukan kebijakan domestik maupun politik luar negeri. Hal ini dapat dilihat pada terpilihnya Presiden Rodrigo Duterte sebagai Presiden ke-16 Filipina, dimana Presiden Rodrigo Duterte berusaha menepati janjinya pada saat kampanye, yaitu membersihkan semua tindakan kriminal yang ada di Filipina tanpa kompromi. Filipina juga cenderung mengubah orientasi politik luar negerinya, yang semula bergantung pada Amerika Serikat, berubah dengan menjalin hubungan baik dengan RRT dan tidak lagi bergantung pada politik luar negeri Amerika Serikat<sup>7</sup>. Pergantian pemimpin negara membuat berbagai perubahan terjadi dalam negara tersebut, demikian juga dalam konflik Laut Cina Selatan.

Pengaruh pemimpin negara dalam pembentukan kebijakan sangatlah penting. Karakter dari seorang pemimpin dapat menentukan gaya kepemimpinannya dan kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan dapat merubah orientasi kebijakan di suatu negara, baik dalam maupun luar negeri.

---

<sup>6</sup> Deutsche Welle. *Filipina Tinggalkan ASEAN dan Mendekat ke Cina*. 2016. Terdapat dalam <http://www.dw.com/id/filipina-tinggalkan-asean-dan-mendekat-ke-cina/a-19297934>. Diakses pada 22 Desember 2016.

<sup>7</sup> Benny D. Koestanto. *Pernyataan Keras Sang Presiden*. Harian Kompas. 23 Oktober 2016. Hal. 3.

Seperti yang terjadi di Filipina, dalam pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, berbagai perubahan kebijakan terjadi, khususnya kebijakan politik luar negeri.

Memasuki masa pemerintahannya, Presiden Duterte mengambil tindakan untuk berunding secara bilateral dengan RRT dan menyatakan bahwa dirinya tidak ingin menuntaskan sebuah konflik melalui pengadilan internasional<sup>8</sup>. Kedua negara juga bersepakat membicarakan lagi masalah perselisihan tentang kondisi di Laut Cina Selatan. Upaya ini dilakukan Presiden Duterte hanya beberapa bulan setelah keluarnya keputusan dari Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda, yang menyatakan klaim historis RRT di perairan Laut Cina Selatan tidak berlandaskan hukum.<sup>9</sup>

Dari kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina, dapat terlihat transisi kebijakan politik luar negeri yang sangat berbeda jauh, bahkan bertolak belakang dengan pendahulunya, mantan Presiden Benigno Aquino III. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kepribadian Presiden Rodrigo Duterte itu sendiri, dan juga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan politik luar negerinya. Sikap Presiden Duterte yang lebih kooperatif namun tetap tegas, menjadi permulaan baru bagi hubungan Filipina dan RRT, terkhususnya dalam penyelesaian konflik klaim tumpang tindih Laut Cina Selatan.

---

<sup>8</sup> Deutsche Welle. *Filipina Tinggalkan ASEAN dan Mendekat ke Cina*. 2016. Terdapat dalam <http://www.dw.com/id/filipina-tinggalkan-asean-dan-mendekat-ke-cina/a-19297934>. Diakses pada 22 Desember 2016.

<sup>9</sup> Harian Kompas. *Duterte Ucapkan Selamat Tinggal ke AS*. 21 Oktober 2016. Hal. 9.

Kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, melakukan berbagai pendekatan-pendekatan dengan RRT, termasuk dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Berbeda dengan kebijakan politik luar negeri Filipina sebelumnya, pada masa pemerintahan Benigno Aquino III, yang bersifat kompetitif dan bertentangan dengan RRT, hingga memperburuk hubungan kedua negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, khususnya kebijakan politik luar negeri Filipina mengenai Laut Cina Selatan dalam judul **“Kebijakan Politik Luar Negeri Filipina pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte tentang Laut Cina Selatan”**.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Untuk lebih memudahkan pembahasan ini, penulis tidak akan mengkaji kebijakan politik luar negeri Filipina secara keseluruhan, namun penulis hanya mengkaji substansi dari kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte tentang Laut Cina Selatan, sejak terpilihnya hingga masa mendatang sesuai kurun waktu kekuasaannya.

Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi kebijakan politik luar negeri Filipina di Laut Cina Selatan?
2. Bagaimana wujud kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte tentang Laut Cina Selatan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan apa saja yang melatarbelakangi kebijakan politik luar negeri Filipina di Laut Cina Selatan.
- b. Untuk menjelaskan wujud kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte tentang Laut Cina Selatan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Apabila tujuan di atas tercapai, maka penelitian ini:

1. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa Hubungan Internasional maupun mahasiswa lainnya yang mempunyai perhatian dan minat yang sama dalam kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dan juga mengenai perkembangan isu Laut Cina Selatan.

2. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu masukan kepada setiap elemen yang berminat membahas topik yang sama maupun berhubungan dengan kebijakan politik luar negeri Filipina dan mengenai isu Laut Cina Selatan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Kebijakan Politik Luar Negeri Presiden**

Kerangka konseptual yang digunakan penulis adalah kebijakan politik luar negeri Presiden. Kebijakan politik luar negeri merupakan hal yang harus dirumuskan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. Dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri suatu negara, terdapat adanya peran penting dari para aktor dan struktur pemerintahan yang berlaku dalam suatu negara. Namun, ada aktor-aktor yang memegang tanggung jawab penting dalam perumusan kebijakan politik luar negeri, yang berbeda-beda di setiap negara. Aktor-aktor tersebut, meliputi kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau sekretaris negara, partai politik, parlemen, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Kebijakan politik luar negeri suatu negara, tidak dapat terbentuk dan terealisasi tanpa adanya aktor yang berperan sebagai pengambil kebijakan. Seorang pemimpin negara, memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri dari negara yang dipimpinnya. Namun, ada

---

<sup>10</sup> Steve Smith, Amelia Hadfield, dan Tim Dunne. 2012. *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Second Edition)*. New York: Oxford University Press. Hal. 114.

kecenderungan yang berbeda-beda dalam setiap negara. Terdapat negara yang merumuskan kebijakan-kebijakannya secara bersama-sama dalam perundingan bersama seluruh *stakeholder* yang ada. Namun, terdapat pula negara yang merumuskan kebijakan-kebijakannya dengan didominasi oleh keputusan pemimpin negara.

Pandangan Holsti mengkategorisasikan, ide yang disampaikan oleh pembuat kebijakan, dengan tujuan untuk merespon persoalan dan menciptakan perubahan dalam lingkungan tempat negara berinteraksi sebagai wujud dari politik luar negeri. Dalam definisi politik luar negeri yang dikemukakan Holsti, politik luar negeri tidak terbatas dalam bentuk kebijakan dan tindakan negara saja, akan tetapi, perilaku pengambil kebijakan juga dapat dikategorikan sebagai politik luar negeri selama hal tersebut mempengaruhi lingkungan tempat interaksi negara dilakukan.<sup>11</sup>

Dalam pemerintahan Filipina, perumusan dan keputusan kebijakan politik luar negeri didominasi oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki pengaruh yang dominan dalam pembuatan kebijakan, sekalipun tetap ada andil dari pemangku jabatan pemerintahan lainnya. Karena itu, negara Filipina sangat bergantung kepada keputusan Presiden dalam kebijakan politik luar negerinya.

---

<sup>11</sup> Radityo Dharmaputra dan Dias Pabyantara. 2015. *Analisis Politik Luar Negeri: Tinjauan Mikro ke Makro*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis. Hal. 2-3.

Kebijakan politik luar negeri Filipina dirumuskan dan dijalankan untuk mampu mempertemukan kepentingan nasional dengan lingkungan internasional yang tidak menentu. Memasuki masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, kepentingan nasional Filipina harus dibawa dalam politik internasional melalui kebijakan politik luar negerinya. Berkaitan dengan sengketa wilayah Laut Cina Selatan, Filipina membawa kebijakan yang berbeda dari sebelumnya, dengan menekankan kepada prinsip kooperatif dalam menyelesaikan suatu konflik atau perselisihan dengan negara lain, dalam hal ini adalah RRT.

Pentingnya posisi suatu negara dalam dunia internasional membuat Filipina yang dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte, harus mampu mengambil langkah yang tepat dalam perumusan kebijakan politik luar negerinya, serta mampu memimpin negara dan membentuk kekuatan domestik, yang dapat berimplikasi pada kekuatan kebijakan politik luar negeri, yang dapat memberikan manfaat yang nyata untuk rakyat Filipina secara keseluruhan.

## **2. *Political Personality***

Kerangka konseptual yang kedua adalah *Political Personality*. Sehubungan dengan konsep mengenai kebijakan politik luar negeri Presiden, penulis menggunakan konsep *political personality*. Dimana, *political personality* menjelaskan bagaimana kepribadian seorang individu, yang dalam hal ini adalah seorang pemimpin negara, yang melahirkan tindakan maupun pemikiran politik,



dan kemudian mempengaruhi perumusan kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Menurut Rober E. Lane, *political personality* dapat diartikan sebagai pola-pola kebiasaan dari perasaan, proses belajar, serta bertindak dalam berbagai situasi politik.<sup>12</sup> Karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan politik luar negeri juga dipengaruhi oleh *political personality* dari seorang presiden atau pemimpin negara. Kepribadian dan pengalaman dari seorang pemimpin negara dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dan keputusan politik, dalam negara yang dipimpinnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, khususnya dalam penanganan konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode berbasis dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah setiap bahan yang menyediakan informasi

---

<sup>12</sup> Robert E. Lane. 2008. *The Study of Political Personality*. International Encyclopedia of the Social Sciences. Terdapat dalam <http://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/personality-political>. Diakses pada 24 Januari 2017.

tentang fenomena sosial yang diteliti. Penulis menelaah sejumlah dokumen primer atau yang dikenal dengan dokumen resmi, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh negara, organisasi, maupun suatu kelompok.<sup>13</sup> Dokumen resmi yang ditelaah oleh penulis meliputi pernyataan kebijakan, catatan atau memorandum atau email resmi. Selain itu, penulis juga menelaah dokumen sekunder, yaitu dokumen yang mengacu kepada dokumen primer atau menganalisis dokumen primer. Kemudian, penulis menggunakan metode berbasis internet, dan juga menelaah laporan media yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Adapun dokumen tersebut berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, berita internasional dari media cetak dan elektronik, dan dokumen resmi negara, yang semuanya diperoleh melalui:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar;
- b. Perpustakaan Ali Alatas, Kementerian Luar Negeri di Jakarta;
- c. Situs resmi Filipina;
- d. Kedutaan Besar Filipina di Jakarta;
- e. Center Strategic for International Studies (CSIS) di Jakarta;
- f. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta;
- g. Perpustakaan Universitas Indonesia di Depok;
- h. Situs Media Internasional.

### **3. Teknik Analisa Data**

---

<sup>13</sup> Umar Suryadi Bakry. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 173.

Penulis menganalisis dan menginterpretasikan data hasil penelitian dengan teknik analisis data kualitatif. Penulis menganalisis data yang berasal dari dokumen primer, dokumen sekunder, dan juga laporan media, yang pada umumnya berbentuk bahan-bahan tekstual yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode analisis psikobiografi, yang menganalisis tentang kepribadian individu, dalam tulisan ini adalah seorang pemimpin negara. Metode ini mengembangkan analisis tentang figur politik, dan berusaha memahami bagaimana peristiwa kehidupan tertentu telah membentuk personalitas, sikap, dan perilaku politik seorang pemimpin.<sup>14</sup>

#### **4. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode deduktif. Metode ini dilakukan dengan menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menjelaskan hasil analisis data dalam tulisan ini.

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 305.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep tentang Kebijakan Politik Luar Negeri

Kebijakan politik luar negeri dijalankan untuk dapat menjawab kebutuhan dan disesuaikan dengan kepentingan masing-masing negara. Karena itu, semuanya dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan yang ada dalam setiap negara. Kebijakan politik luar negeri merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil suatu negara mengenai hubungan atau tindakan-tindakan yang melalui batas negara. Kebijakan politik luar negeri dapat berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, dan mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.<sup>15</sup>

Terdapat banyak ahli yang mencoba untuk mendefinisikan kebijakan politik luar negeri dengan penekanan yang berbeda-beda. Sebuah definisi singkat mengenai kebijakan politik luar negeri disimpulkan oleh Christopher Hill sebagai berikut: *“the sum of official external relations conducted by an independent actor (usually a state) in international relations”*.<sup>16</sup> Definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan politik luar negeri adalah jumlah dari hubungan eksternal yang dijalankan oleh aktor, yang pada umumnya adalah negara, dalam hubungan internasional.

---

<sup>15</sup> Abubakar Eby Hara. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri*. Bandung: Nuansa. Hal. 15.

<sup>16</sup> Christopher Hill. 2003. *The Changing Politics of Foreign Policy*. New York: Palgrave Macmillan. Hal. 3.

Kemudian, K. J. Holsti mendefinisikan, *foreign policy as the analysis of decisions of a state toward the external environment and the condition-usually domestic under which these actions are formulated*.<sup>17</sup> Definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan politik luar negeri sebagai analisis keputusan atau kebijakan dari suatu negara terhadap lingkungan internasional yang berkaitan dengan kondisi domestik negara tersebut, yang menjadi sumber kebijakan politik luar negeri itu terbentuk.

Selanjutnya Walter Carlsnaes, memberikan definisi klasik dan detail mengenai kebijakan politik luar negeri, yaitu:

“Tindakan-tindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi dan aktor (baik pemerintah maupun non pemerintah) yang berada di luar wilayah teritorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen dan atau arah yang dinyatakan secara eksplisit, dan yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama negara atau komunitas yang berdaulat”<sup>18</sup>

Lebih lanjut, menurut Mark R. Amstutz, kebijakan politik luar negeri sebagai *explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundaries*.<sup>19</sup> Dalam definisi ini, ada tiga hal yang ditekankan di dalamnya, yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional, dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas

---

<sup>17</sup> K. J. Holsti. 1970. *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. *International Studies Quarterly*. Vol. 14. No. 3. Hal. 233-309. Terdapat dalam [https://www.jstor.org/stable/3013584?seq=23#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/3013584?seq=23#page_scan_tab_contents).

<sup>18</sup> Carlsnaes. 2002. Terdapat dalam Abubakar Eby Hara. 2011. Hal. 15-16.

<sup>19</sup> Mark R. Amstutz. 1995. Terdapat dalam Aleksius Jemadu. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 64.

wilayah suatu negara.<sup>20</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor-aktor lain di luar batas wilayahnya, secara konseptual merupakan bagian dari pengertian kebijakan politik luar negeri. Definisi ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan politik luar negeri mencakup dimensi yang luas, baik itu ekonomi, keamanan, maupun sosial budaya.<sup>21</sup>

Definisi kebijakan politik luar negeri juga dinyatakan oleh Kegley dan Wittkopf, yang menekankan kebijakan politik luar negeri sebagai *the decisions governing authorities make to realize international goals*.<sup>22</sup> Definisi ini menekankan kepada peranan kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang harus sesuai dengan tujuan internasional yang berkaitan dengan negara tersebut. Kedua penulis menekankan bahwa studi kebijakan politik luar negeri harus memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perumusan tujuan suatu negara serta alat yang digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>23</sup>

Dengan demikian, secara umum, dapat di katakan bahwa kebijakan politik luar negeri merupakan konsep yang digunakan oleh negara atau pemerintah, maupun aktor non-pemerintah sebagai acuan dan pedoman dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain di lingkungan eksternal dan internasional, yang mewakili kepentingan internal atau domestik suatu negara.

---

<sup>20</sup> Aleksius Jemadu. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 65.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Charles W. Kegley Jr. dan Eugene R. Wittkopf. 2003. Terdapat dalam Aleksius Jemadu. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 65.

<sup>23</sup> Ibid.

Kebijakan politik luar negeri merupakan perpanjangan dari kebijakan politik dalam negeri yang terbentuk berdasarkan kepentingan nasional suatu negara. Itulah sebabnya, kebijakan politik luar negeri setiap negara berbeda-beda sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Kebijakan yang diimplementasikan dalam suatu negara berimplikasi pada kebijakan politik luar negerinya. Karena itu, kebijakan dalam negeri harus stabil dan jelas arah dan tujuannya, sehingga menghasilkan kestabilan politik luar negeri yang berlaku di tingkat internasional.

Seiring dengan berkembangnya dunia internasional, politik luar negeri suatu negara dapat berubah-ubah sesuai dengan urgensi kebutuhan negara yang bersangkutan dan bagaimana kebijakan dalam negerinya berjalan. Ada unsur-unsur dalam kebijakan politik luar negeri yang dapat tetap dipertahankan, ada pula unsur-unsur yang harus mengalami perubahan. Banyak faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan perubahan dalam kebijakan politik luar negerinya, baik yang bersumber pada lingkungan domestik, maupun bersumber pada perkembangan lingkungan eksternal yang perlu diantisipasi untuk pencapaian tujuan nasional.<sup>24</sup>

Dalam buku yang berjudul *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior*, Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lamtis, dan Ryan K. Beasley melakukan studi perbandingan kebijakan luar negeri dari berbagai negara. Mereka membedakan antara faktor-faktor eksternal dan

---

<sup>24</sup> Aleksius Jemadu. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, ed. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 62.

domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dari hasil studi perbandingan tersebut, mereka pun menyebutkan:<sup>25</sup>

Dua faktor internasional yang mempengaruhi perilaku negara dalam politik global yaitu persoalan anarkhi dan kekuasaan, serta persoalan ketergantungan atau dependensi dan interdependensi dalam sistem internasional. Dua faktor ini dianggap relevan untuk menganalisis kebijakan politik luar negeri negara-negara berkembang, karena masalah ketergantungan ekonomi merupakan determinan utama bagi mereka yang menentukan kiprahnya dalam politik global. Faktor internal meliputi berbagai ranah masing-masing dengan persoalan tersendiri yang mempengaruhi kebijakan luar negeri.<sup>26</sup>

Dengan demikian, hasil studi perbandingan tersebut menunjukkan perilaku negara dalam politik internasional, yang terlihat melalui kebijakan politik luar negerinya, dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan persoalan ketergantungan, khususnya bagi negara berkembang, adalah ketergantungan dalam bidang ekonomi. Selain itu, kebijakan politik luar negeri juga dipengaruhi dari berbagai faktor lainnya, seperti opini publik dan budaya, persoalan demokrasi dan birokrasi dalam negeri, serta dari ranah pemimpin, yaitu faktor kepribadian seorang pemimpin negara.

Pendapat lain juga muncul dengan mengemukakan ide tentang *foreign policy influences* melalui tiga tingkat analisis. Tingkat analisis yang pertama, merupakan tingkat analisis yang paling luas, yaitu *global influences*, yang mewujudkan karakteristik dasar politik dan ekonomi global yang berlaku. Tingkat analisis berikutnya adalah *state or internal influences* yang diwujudkan dalam bentuk rezim politik yang berkuasa dan budaya masyarakat pada umumnya. Kemudian, tingkat

---

<sup>25</sup> Ibid. Hal. 78-79.

<sup>26</sup> Ibid.



analisis yang terakhir adalah *individual influences*, yang menyatakan bahwa kepribadian dan sistem nilai yang dianut pemimpin negara, dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik luar negeri.<sup>27</sup>

Untuk dapat mengerti dinamika dari kebijakan politik luar negeri, hal yang penting untuk diperhatikan adalah proses pembentukan kebijakan politik luar negeri tersebut. Para ahli kemudian berusaha menjelaskan peran aktor dan struktur yang selalu terlibat dalam pembentukan kebijakan politik luar negeri. Hubungan erat antara kedua faktor tersebut, dikemukakan oleh Christopher Hill, yaitu:

*“Foreign policy making is a complex process of interaction between many actors, differentially embedded in a wide range of different structures. Their interaction is a dynamic process, leading to the constant evolution of both actors and structures.”*<sup>28</sup>

Hal ini menunjukkan, peranan aktor dan struktur dalam suatu negara sangatlah penting dalam pembentukan kebijakan politik luar negeri. Aktor-aktor yang paling berperan penting adalah kepala negara atau kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau sekretaris negara, parlemen, partai politik, dan lain-lain.<sup>29</sup> Aktor-aktor inilah yang memiliki tanggung jawab politik dalam pembentukan kebijakan, yang dimulai dari kebijakan domestik yang kemudian berimplikasi pada kebijakan politik luar negeri.

---

<sup>27</sup> Ibid. Hal. 80.

<sup>28</sup> Christopher Hill. 2003. Terdapat dalam Steve Smith, Amelia Hadfield, dan Tim Dunne. 2012. *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Second Edition)*. New York: Oxford University Press. Hal. 114.

<sup>29</sup> Steve Smith, Amelia Hadfield, dan Tim Dunne. 2012. *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Second Edition)*. New York: Oxford University Press. Hal. 114.

Hal yang sama teraplikasi dalam faktor struktural. Faktor ini ikut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik luar negeri. Struktur politik, budaya, psikologikal, ekonomi, nasional, regional, global, teknologikal, ideologi, kognitif, dan normatif, merupakan struktur yang hadir dalam kelompok-kelompok masyarakat, negara, dan juga secara internasional. Tidak semua memiliki pengaruh yang penting dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri, namun banyak yang sangat vital dan sentral untuk dapat mengerti dan menjelaskan manifestasi dari keberadaan dan interaksi struktur-struktur tersebut dengan aktor-aktor dalam pembentukan kebijakan politik luar negeri.<sup>30</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, tidaklah salah jika dikatakan peran pemimpin suatu negara sangat penting dalam pembentukan kebijakan politik luar negeri. Terlebih lagi di zaman yang terus berkembang ini, peran pemimpin negara mulai diperhitungkan dan menjadi sorotan. Bahkan banyak ditemui kebijakan politik luar negeri suatu negara yang mencerminkan pandangan dan kepribadian dari orang yang berkuasa di dalam negara tersebut.<sup>31</sup> Peranan pemimpin negara dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri menjadi sangat dibutuhkan terutama dalam keadaan terdesak, tidak menentu, dan kompleks.

Tantangan bagi seorang pemimpin negara dalam pembentukan kebijakan politik luar negeri adalah berusaha untuk menyeimbangkan faktor internal dan eksternal, yaitu tuntutan domestik dan juga tuntutan dari dunia internasional. Dalam

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ryan K. Beasley, at al. 2013. *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior*. California: CQ Press. Hal. 330.

buku *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and Internasional*

*Influences on State Behavior*, Ryan K. Beasley dan Michael T. Snarr menulis:

*“Individuals in leadership positions often face numerous and significant constraints from external and internal actors and institutions. Nevertheless, it is a human or a group of humans that actually make the choices that constitute a state’s foreign policy..... It is clear that leaders matter at some times more than others and that at those times when leaders are important, their beliefs, perceptions, experiences, and decision-making styles can affect whether or not they recognize constraints on their states and how they respond to them.”*<sup>32</sup>

Dengan demikian, berdasarkan beragam definisi mengenai kebijakan politik luar negeri serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte cenderung dipengaruhi oleh faktor individu dari Presiden Rodrigo Duterte itu sendiri dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lainnya. Presiden Rodrigo Duterte memulai kebijakannya dengan kebijakan tegas yang berlaku dalam negeri, yaitu menetapkan sanksi hukuman mati secara langsung bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus narkoba. Hal ini menunjukkan kekuatan negaranya di mata dunia, termasuk dalam upaya mengambil hati RRT yang memiliki kebijakan domestik yang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukannya di Filipina. Setelah itu, isu Laut Cina Selatan yang beberapa waktu sebelum masa pemerintahannya menuai ketegangan dengan RRT, berusaha diredamkan oleh Presiden Rodrigo Duterte, sehingga Filipina mendapat perhatian dunia, terutama mengenai pengaruhnya dalam stabilitas kawasan Laut Cina Selatan.

---

<sup>32</sup> Ibid. Hal. 333.

## B. Konsep *Political Personality*

Sebelum menjelaskan konsep *political personality*, penulis akan menjelaskan mengenai kehidupan dari seorang Rodrigo Duterte, yang menjadi aktor utama dalam tulisan ini. Kehidupan dan pengalaman-pengalaman seorang pemimpin negara, yaitu Rodrigo Duterte penting untuk diketahui, karena kehidupan yang Rodrigo Duterte jalani setiap hari adalah bagian dari kepribadian Rodrigo Duterte, dan menyangkut *political personality* yang dimilikinya, yang kemudian dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambilnya, termasuk kebijakan politik luar negeri Filipina.

Rodrigo Roa Duterte, lahir pada 28 Maret 1945, di Maasin, *Southern Leyte*, Filipina, yang merupakan tempat Vincent Duterte, ayahnya, dan Soledad Roa, ibunya, bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Ayahnya merupakan seorang pegawai pemerintahan, yang kemudian menjadi seorang walikota dan setelah itu menjadi seorang gubernur yang dulunya masih disebut Provinsi Davao pada tahun 1959-1965. Sedangkan, ibunya merupakan seorang guru di sekolah negeri dan juga merupakan seorang aktivis dalam sebuah komunitas.<sup>33</sup> Rodrigo Duterte dan keluarganya berpindah dari Cebu ke kota Davao pada saat Rodrigo Duterte duduk di bangku sekolah dasar.<sup>34</sup> Rodrigo Duterte memulai sekolah dasarnya di *Laboon Elementary School* di Maasin. Namun, satu tahun kemudian, ketika keluarganya pindah ke kota Davao, Rodrigo Duterte melanjutkan sekolah dasarnya di *Santa Ana*

---

<sup>33</sup> Biography, *Rodrigo Duterte Biography*, diakses pada <http://www.biography.com/people/rodrigo-duterte-102616>.

<sup>34</sup> *Rodrigo Roa Duterte President Republic of Philippines*, diunduh dari [https://www.philippineembassy-usa.org%2Fuploads%2FJULY%25202016%2FBio\\_Rodrigo%2520Roa%2520Duterte.pdf&usg=AFQjCNEEE8lbdg3jDhkibj5h8HKp5jCa6Q](https://www.philippineembassy-usa.org%2Fuploads%2FJULY%25202016%2FBio_Rodrigo%2520Roa%2520Duterte.pdf&usg=AFQjCNEEE8lbdg3jDhkibj5h8HKp5jCa6Q).

*Elementary School* dan lulus sekolah dasar tersebut pada tahun 1956. Selanjutnya, Rodrigo Duterte masuk dalam beberapa sekolah menengah dan melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah atas. Namun, Rodrigo Duterte dua kali dikeluarkan dari sekolah menengah atas karena berkelakuan buruk. Rodrigo Duterte akhirnya diterima pada *High School Department of Holy Cross College* (sekarang bernama *Cor Jesu College*) di Digos dan akhirnya menyelesaikan sekolahnya disana.

Sebenarnya, Rodrigo Duterte bukanlah murid yang buruk. Ia hanya menikmati pergaulannya dengan preman-preman kota di jalan-jalan dan terpengaruh dengan kata-kata yang mereka gunakan dan juga terpengaruh dengan sikap atau perilaku mereka. Hal itu menyebabkan Rodrigo Duterte mendapat masalah yang besar di sekolahnya dan juga mendapat hukuman yang hebat dirumahnya. Meskipun demikian, hal itu jugalah yang kemudian membantunya terkoneksi dengan masyarakat sekitar.<sup>35</sup>

Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, Rodrigo Duterte melanjutkan pendidikannya di *Lyceum of the Philippines University*, dimana ia banyak dipengaruhi dengan *Communist Party of the Philippines* yang didirikan oleh Jose Maria Sison. Pada tahun 1968, ia lulus sebagai sarjana ilmu sastra dengan gelar ilmu politik. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya pada *San Beda College Law*. Ia selalu menjadi aktivis di kampus dan selalu berpegang pada apa yang dianggapnya benar. Ia bahkan menembak rekan mahasiswanya karena bersikap rasis dan

---

<sup>35</sup> The Famous People, *Rodrigo Duterte Biography*, diakses dalam <http://www.thefamouspeople.com/profiles/rodrigo-duterte-7713.php> .

mengucapkan kata-kata yang merendahkan etnis lain. Korbannya selamat dan Rodrigo Duterte diperbolehkan melanjutkan dan menyelesaikan kuliahnya, dan akhirnya mendapatkan gelar sarjana hukum pada tahun 1972, namun tidak diizinkan mengikuti acara wisudanya.

Rodrigo Duterte memulai karirnya dalam dunia hukum sebagai *Special Counsel* pada *City Prosecution Office*, di Kota Davao pada tahun 1977-1979. Kemudian, tahun 1979-1981, ia menjadi *Fourth Assistant City Prosecutor*. Pada tahun, 1981-1983, ia menjabat sebagai *Third Assistant City Prosecutor*. Lalu pada tahun 1983-1986, ia menjadi *Second Assistant City Prosecutor*.

*People's Power Revolution* terjadi pada tahun 1986, dengan penggulingan pemerintahan diktator, Ferdinand Marcos, dan merestorasi institusi demokratis dalam negeri. Pada tahun yang sama, Rodrigo Duterte ditunjuk sebagai wakil walikota dari kota Davao. Kemudian, pada tahun 1988 ia mengikuti pemilihan walikota dan terpilih sebagai walikota Davao selama dua periode, yaitu hingga tahun 1998. Pada masa pemerintahannya, ia memberikan contoh dengan memilih wakil-wakil walikotanya dari Lumad dan Komunitas Moro, sebuah tindakan yang kemudian ditiru oleh kota-kota lain.

Peraturan negara yang tidak memperbolehkan seseorang dalam pemerintahan menjabat selama tiga periode berturut-turut, membuat Rodrigo Duterte tidak lagi mengikuti pemilihan walikota pada tahun 1998. Ia kemudian memilih untuk masuk dalam seleksi *House of Representatives* dan ia menang. Ia kemudian menjabat sebagai *Congressman of the First District of Davao City*, namun ia merasa bosan

dengan pekerjaan tersebut. Lalu ia kembali mengikuti pemilihan walikota Davao pada tahun 2001.

Setelah itu, ia memenangkan tiga periode pemilihan walikota Davao, yaitu pada tahun 2001, 2004, dan 2007. Pada periode ini, kondisi kota Davao berkembang di segala bidang dan memenangkan *National Literacy Hall of Fame Award* karena menduduki posisi pertama pada *Outstanding Local Government Unit, Highly Urbanized City category thrice*. Selain itu, Rodrigo Duterte tidak pernah membatasi dirinya hanya bekerja di kantor, tetapi ia bekerja di jalan-jalan, mengadakan konvoi dengan motor besarnya dan juga dengan senapan M16. Hasilnya, tingkat kriminalitas turun drastis pada masa jabatannya. Ia juga membuat kota Davao menjadi lebih bersih dengan menjalankan larangan merokok. Karena semua yang dilakukannya di kota Davao, ia masuk dalam nominasi *World Mayor Award*, yang diselenggarakan oleh *City Mayor Foundation*, namun ia menolaknya dengan alasan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya sebagai walikota.

Kemudian, setelah menjabat selama tiga periode berturut-turut sebagai walikota Davao, Rodrigo Duterte kembali dihalangi oleh hukum untuk mengikuti pemilihan dengan posisi yang sama. Oleh karena itu, ia mengambil posisi sebagai wakil walikota Davao dan putrinya, Sara Duterte Carpio menjadi walikotanya, pada tahun 2010. Pada tahun 2013, Rodrigo Duterte kembali mengikuti pemilihan walikota dan memenangkannya. Lalu, pada tahun 2014, Rodrigo Duterte diminta untuk mengikuti pemilihan Presiden. Awalnya ia ragu, dikarenakan dana kampanye yang sedikit dan hal-hal lainnya. Namun, akhirnya Rodrigo Duterte mencalonkan diri dan

memenangkan pemilihan presiden tersebut dan menjadi Presiden Filipina ke-16, yaitu Presiden Filipina pertama yang berasal dari Pulau Selatan, Mindanao, pada 30 Juni 2016.<sup>36</sup>

Kemudian, mengenai kehidupan pribadinya, Rodrigo Duterte menikah dengan Elizabeth Abellana Zimmerman dan memiliki tiga orang anak, yaitu Paolo, Sara, dan Sebastian. Paolo dan Sara masuk dalam dunia politik, sedangkan Sebastian sebagai bisnisan. Namun, karena ketidaksetiaan Rodrigo Duterte yang juga diakuinya sendiri di depan publik, Zimmerman akhirnya mengajukan pembatalan pernikahan yang dikabulkan pada tahun 2000. Akan tetapi, hubungan keduanya tetap baik. Pada tahun 1990-an, Rodrigo Duterte membangun hubungan dengan Cielito Avancena, yang hingga sekarang menjadi isterinya secara hukum, dan dikaruniai seorang anak yaitu, Veronica. Rodrigo Duterte juga dulunya adalah seorang perokok keras, namun berhenti dengan alasan kesehatan. Namun karena kecanduannya dulu, ia menderita penyakit peradangan dan pembekuan pembuluh darah pada tangan dan kakinya.

Rodrigo Duterte terbentuk dari didikan yang keras oleh kedua orang tuanya. Ibunya mendeskripsikan Rodrigo Duterte sebagai anak petualang, yang sangat jarang berada di rumah. Rodrigo Duterte menerima banyak pukulan dari ibunya sejak kecil. Ia juga dikucilkan oleh ayahnya dengan disekolahkan di sekolah menengah atas yang jauhnya 57 km dari kota Davao. Rodrigo Duterte bahkan pernah mengalami pelecehan seksual yang menyebabkan Rodrigo Duterte sangat membenci kejahatan dan ingin memberantas kejahatan dengan berbagai cara.

---

<sup>36</sup> Ibid.



Rodrigo Duterte adalah seseorang yang sangat menyayangi orang tuanya. Setiap kali ada masalah yang dihadapinya, ia selalu datang mengunjungi makam orang tuanya. Ia pun mengaku tidak bisa tidur tanpa selimut pemberian ibunya. Selain itu, Rodrigo Duterte memiliki hobi membaca buku. Ia juga sangat menyukai motor yang besar, namun tidak membenci mobil-mobil mewah. Rodrigo Duterte juga adalah seorang yang berbicara apa adanya, bahkan sering mengeluarkan kata-kata kotor.

Akan tetapi, dibalik sikap kerasnya, Rodrigo Duterte adalah seorang yang sangat mencintai negeri dan rakyatnya. Hal ini dapat dilihat, ketika Rodrigo Duterte mengunjungi Tacloban yang dilanda badai Yolanda dan mengalami kerusakan yang sangat hebat. Saat itu, Rodrigo Duterte menjadi walikota pertama yang mendatangi tempat itu dan memberikan donasi. Ia sendiri juga memimpin tim kemanusiaan untuk langsung mendatangi Tacloban. Rodrigo Duterte bahkan terlihat menangis melihat keadaan Tacloban saat itu.<sup>37</sup> Rodrigo Duterte juga peduli dengan rakyat pribumi (*indigenous groups*), yang dipengaruhi oleh ibunya, Soledad Roa, yang sangat aktif dalam berbagai program untuk mengembangkan komunitas-komunitas suku yang ada di Filipina.<sup>38</sup>

Dari masa lalu dan pengalaman-pengalaman Rodrigo Duterte, terbentuklah kepribadian Rodrigo Duterte, yang akhirnya juga berpengaruh pada aspek politik, dimana ia bekerja. Kepribadiannya mempengaruhi perilaku politiknya. Inilah yang

---

<sup>37</sup> Rappler, *22 Things to Know About Duterte Harry*, diakses pada <http://www.rappler.com/newsbreak/iq/105955-things-know-trivia-rodrigo-duterte> .

<sup>38</sup> FilipiKnow, *25 Things You Didn't Know About President Rodrigo Duterte*, diakses pada <http://www.filipiknow.net/rodrigo-duterte/>

juga menjadi bahan acuan dari analisis kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte, dengan menggunakan konsep *political personality*.

*Political Personality* adalah dua kata yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Alan C. Elms, mengartikan *personality* dalam bukunya, *Personality in Politics*, bahwa:

*“Personality as including any individual psychological variations that influence behavior. Some psychological reactions are found in equal intensity in virtually all individuals, given the right stimulus; these I say little about. Personality enters the picture when a psychological characteristic common to all people is found to vary in intensity or expression among different individuals (for example, sexual desires), or when a characteristic is found in some people and not in others (for example, achievement motivation).”*<sup>39</sup>

Kemudian, menurut Allport, *personality is the dynamic organization within the individual of these psychophysical systems that determine his unique adjustments to his environment*. Lebih lanjut pendapat Allport ini dirangkumkan, dan menjelaskan bahwa kepribadian: (1) merupakan organisasi yang dinamis, tidak statis, dan dapat berubah sewaktu-waktu; (2) organisasi itu terdapat dalam diri individu, bukan di luar individu; (3) organisasi itu terdiri dari sistem psikis (sifat, bakat, dan sebagainya) serta fisik (anggota dan organ-organ tubuh) yang saling terkait; (4) organisasi itu menentukan corak penyesuaian terhadap lingkungannya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Alan C. Elms. 1976. *Personality in Politics*. USA: Harcourt Brace Jovanovich. Hal. V.

<sup>40</sup> Sarlito Wirawan Sarwono. 2005. *Psikologi Sosial, Individu, dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka. Terdapat dalam Muhammad Alfian Alfian. 2016. *Wawasan Kepemimpinan Politik*. Bekasi: Penjuru Ilmu Sehati. Hal. 180.

Sedangkan, Fred I. Greenstein menjelaskan kata *politics* pada *political personality* merujuk kepada politik yang sering dipelajari oleh ilmuwan politik, yaitu:

*“that of civil government and of the extra-governmental processes that more or less directly impinge upon government, such as political parties and interest groups. Broadly construed, it refers to politics in all of its manifestations, whether in government or any other institution, including many that are rarely studied by political scientists, for example, the family, school, and workplace. By this broader construction, the common denominator is the various referents of politics, including the exercise of influence and authority and the diverse arts of interpersonal maneuver, such as bargaining and persuasion, connoted by the word politicking, none of which are monopolized by government.”*<sup>41</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *personality* merujuk kepada kepribadian dan faktor-faktor psikologi seseorang dalam bertindak maupun berkata-kata, dan dalam menghadapi suatu keadaan atau situasi. Sedangkan, kata politik yang dimaksud merujuk kepada tindakan-tindakan dalam pemerintahan maupun dalam setiap elemen masyarakat yang mengandung unsur politik; yaitu adanya faktor yang dipengaruhi dan faktor mempengaruhi. Sehingga, terdapat keterkaitan antara *personality* dan *politic*, yaitu *personality* yang adalah konsep psikologi, dinyatakan oleh ilmuwan politik sebagai perilaku politik, melalui pengalaman dan pengaruh yang diberikan oleh seorang individu.

Selanjutnya, *political personality* didefinisikan oleh Robert E. Lane sebagai *the enduring, organized, dynamic response sets habitually aroused by political*

---

<sup>41</sup> Fred I. Greenstein. 1992. “Can Personality and Politics Be Studied Systematically?” dalam *Political Psychology*. Vol. 13. No. 1. International Society of Political Psychology. Hal. 107.

*stimuli*.<sup>42</sup> Hal ini mencakup motivasi, yang biasa dianalisa sebagai sebuah kombinasi dari kebutuhan dan nilai-nilai. Hal ini juga mencakup kognitif, persepsi, dan kebiasaan cara belajar, serta kecenderungan tingkah laku yang merupakan manifestasi dari kebutuhan dan aspek lainnya. Setiap hal ini, memiliki implikasi politik yang nyata. Pertama, orang yang termotivasi oleh kebutuhan untuk kekuasaan menggunakan pengaruh politik untuk memuaskan kebutuhan tersebut daripada untuk mengejar tujuan kebijakan yang jelas. Kedua, secara kognitif, seseorang menggunakan informasi untuk mempertahankan pengikutnya daripada sebagai alat untuk pembelajaran yang lebih luas, menjadi dogmatis dan menghalangi adaptasi sosial terhadap situasi yang baru. Ketiga, secara tingkah laku, kehidupan politik secara vital dipengaruhi oleh kecenderungan pemimpin untuk menunjukkan pertentangan psikisnya dan meneruskannya kepada orang lain dalam berbagai situasi, atau kemungkinan untuk membuat permintaan publik yang meredakan rasa ketidakberhargaannya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pola-pola kebiasaan dari perasaan, proses belajar dan mengetahui, serta bertindak dalam berbagai situasi politik merupakan pengertian dari *political personality*.<sup>43</sup>

Berdasarkan definisi diatas, Robert E. Lane menekankan tiga kata yang dapat mendeskripsikan konsep dari *political personality*. Pertama adalah kata '*enduring*', menyatakan bahwa respon yang dimaksud bukanlah untuk situasi sesaat. Akan tetapi,

---

<sup>42</sup> Robert E. Lane. 2008. *The Study of Political Personality*. International Encyclopedia of the Social Sciences. Terdapat dalam <http://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/personality-political>. Diakses pada 24 Januari 2017.

<sup>43</sup> Ibid.

menyangkut pola pikir, emosi, dan cara bertindak dalam mengatasi berbagai situasi yang berbeda dalam jangka waktu yang relatif lama, oleh *youth*, *youth adulthood*, dan *maturity*.<sup>44</sup> Kedua, kata '*organized*' menjelaskan tentang adanya hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok, dan yang ketiga adalah '*dynamic*', yang merujuk kepada kapasitas untuk menghasilkan perubahan dalam sesuatu hal.

Lebih lanjut, menurut Robert E. Lane, konsep *political personality* memiliki batasan dengan konsep lain untuk dapat membedakan suatu kejadian atau objek peristiwa. Konsep yang pertama adalah konsep '*attitude*', yang secara klasik didefinisikan sebagai *mental and neutral response set*. Kepribadian bukanlah sifat, akan tetapi kepribadian yang membentuk sikap seseorang, bukan sebaliknya.

Konsep yang kedua adalah konsep '*role*', yang didefinisikan sebagai pola perilaku yang diharapkan berhubungan dengan posisi yang diberikan dalam masyarakat. Pada prakteknya, tidak mudah untuk membedakan peran yang menentukan perilaku dengan kepribadian menentukan perilaku. Salah satu cara untuk membedakan antara kepribadian dan peranan, dengan mengamati orang dalam peran yang berbeda, misalnya ayah dan birokrat. Secara konseptual, *political personality* memiliki sebuah permulaan awal, sebuah prinsip organisasional yang berbeda, melebihi situasi atau posisi sosial, dan lebih termotivasi secara internal atau otonom lingkungan, menanggapi krisis dan konflik yang berbeda, dan lebih istimewa atau individual daripada perilaku peran politik lainnya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

Menurut David Rosen, ada 6 tipe *political personality*, yaitu *The Narcissist*, *The Obsessive Compulsive*, *The Machiavellian*, *The Authoritarian*, *The Paranoid*, dan *The Totalitarian*.<sup>46</sup> Pertama adalah *The Narcissist*. Tanda dari tipe ini adalah kepribadian yang suka mencari perhatian, suka memperlihatkan kebesarannya, kecenderungan untuk mencari kesalahan orang lain ketika sesuatu berjalan tidak baik, dan selalu menuntut loyalitas namun jarang melakukan hak yang sama. Seseorang dengan tipe ini tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang terbaik, namun kepribadian dengan karisma yang tinggi umumnya menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik.

Kedua, *The Obsessive Compulsive*. Ciri-ciri dari tipe ini adalah seorang yang pekerja keras, teliti, dan beretika, yang dipimpin oleh kebutuhan terhadap akurasi atau ketepatan. Dalam pertimbangan pengambilan keputusan dan kecintaan akan kerumitan, membuat mereka hebat dalam membuat kebijakan, tetapi buruk dalam kepemimpinan, terutama dalam saat krisis yang membutuhkan keputusan yang cepat di tengah situasi yang tidak menentu dan kurang informasi.

Ketiga, *The Machiavellian*. Tipe ini dikatakan pandai dalam memanipulasi dengan mengeksploitasi kelemahan orang lain untuk kepentingan pribadi dan pencapaian politik. Mereka berfokus kepada pertandingan dan bukan pada hasil. Tipe yang cuek dan perhitungan ini tidak terbebani dengan persoalan etis, dan memiliki pemikiran *winning is everything, the rest is negotiable*.

---

<sup>46</sup> David Rosen. *The 6 Political Personality Types*. Campaign and Elections. Terdapat dalam <https://www.campaignsandelections.com/campaign-insider/the-6-political-personality-types>. Diakses pada 24 Januari 2017.

Keempat, *The Authoritarian*. Kepribadian ini adalah murni hirarkis. Tipe ini adalah seorang yang *rule-oriented*, menghargai kekerasan dan tidak berbelas kasihan, konservatif, berprasangka, bersaing dengan sesama, dan mendominasi yang lemah. Kemudian yang kelima adalah *The Paranoid*. Tipe ini adalah kepribadian yang tertutup dan selalu curiga, tidak mudah percaya sekalipun dengan orang terdekat. Kepribadian *Paranoid* terbentuk dari rasa minder atau rendah diri, sehingga ingin selalu melindungi diri sendiri (*ego inflation*).

Terakhir, yang keenam adalah *The Totalitarian*. Kepribadian ini menuntut ketaatan yang mutlak dari orang yang berada di bawahnya, mereka selalu merasa tidak pernah berbuat kesalahan, memegang kekuasaan melalui kombinasi kekaguman, rasa takut, dan sifat mudah tertipu yang dimiliki pendukungnya. Mereka adalah tipe yang selalu ingin di puja, menolak kenyataan yang berlawanan dengan tujuannya, dan fanatisme.

Dari keenam tipe *political personality* tersebut, terlihat bahwa kepribadian seseorang berperan penting dalam tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin negara. Melalui tindakan dan keputusan-keputusan yang diambil, kepribadian seorang pemimpin dapat dikenal.

Berdasarkan keenam tipe tersebut, kepribadian Presiden Rodrigo Duterte memiliki tipe *Narcissist*. Dilihat dari kepribadiannya yang selalu ingin membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, temperamen, berani bertindak dan berkata-kata di depan umum dengan gaya dan ciri khas yang unik dan menarik perhatian

setiap kalangan yang melihatnya. Hal ini juga dilihat dari keputusannya yang seringkali terburu-buru, dan menurut orang lain, bukanlah keputusan yang terbaik.

Selain itu, *political personality* Presiden Rodrigo Duterte, cenderung ingin menunjukkan kekuatan dari dirinya maupun negaranya di mata dunia. Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang berbeda jauh dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Seperti kebijakan untuk tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat dalam hal politik luar negeri, padahal Filipina telah menjadi sekutu Amerika Serikat selama bertahun-tahun, serta kebijakan mengenai hukuman mati bagi pengedar narkoba di Filipina.

Presiden Rodrigo Duterte juga termasuk dalam tipe *Authoritarian*, dimana, Presiden Rodrigo Duterte sangat ingin menegakkan hukum dalam negaranya, bahkan karena begitu menghargai hukum, Presiden Rodrigo Duterte lebih menghargai kekerasan dalam menegakkan hukum dan tidak berbelas kasihan. Presiden Rodrigo Duterte juga memiliki prasangka-prasangka, dan keinginan untuk bersaing, khususnya terhadap negara-negara Barat yang telah mengecam kebijakan domestiknya.

Kemudian, ditinjau dari gaya kepemimpinan, diantara banyaknya jenis gaya kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang menggambarkan sosok Presiden Rodrigo Duterte adalah gaya kepemimpinan otokratis, gaya kepemimpinan otoritatif eksploitatif, gaya kepemimpinan komandan, dan gaya kepemimpinan situasional.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Alfian Alfian. 2016. *Wawasan Kepemimpinan Politik*. Bekasi: Penjuru Ilmu Sejati. Hal. 337-338.



Pertama, adalah gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Sering dijumpai dalam berbagai kesempatan, Presiden Rodrigo Duterte dalam menyampaikan pernyataannya, menyatakan hal-hal yang terlihat tidak dipikirkan sebelumnya, tidak melalui pembicaraan atau konsultasi dengan orang lain. Sehingga, terkadang para menteri harus mengklarifikasi ucapan Presiden Rodrigo Duterte yang tidak semestinya.

Kedua, adalah kepemimpinan otoritatif eksploitatif, yang menggunakan metode ancaman untuk mencapai kesesuaian. Presiden Rodrigo Duterte menggunakan metode ancaman dalam kebijakan dalam negerinya memberantas narkoba, yang akhirnya kebijakan dalam negeri Filipina tersebut mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Filipina. Ketiga, gaya kepemimpinan komandan, yang memerintah dan mengharapkan kepatuhan penuh dari yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat, adalah gaya kepemimpinan situasional, yaitu kepemimpinan yang tidak terpaku pada gaya kepemimpinan tunggal, baik itu transaksional maupun transformasional, tetapi situasional. Presiden Rodrigo Duterte juga memiliki gaya kepemimpinan ini, dimana Presiden Rodrigo Duterte berusaha bersikap lebih adaptif dan kooperatif dalam hubungannya dengan negara tertentu, dan malah menjauhi negara-negara yang lain sebagai dampak dari situasi yang terjadi. Misalnya, dalam hal Filipina berusaha untuk tidak lagi bergantung penuh pada Amerika Serikat ditengah situasi dimana Amerika Serikat juga tidak lagi mendukung kebijakan dalam negeri yang dijalankan Presiden Rodrigo Duterte.

Dari *political personality* Presiden Rodrigo Duterte, yang juga meliputi gaya kepemimpinannya, akan dapat dilihat pengaruhnya terhadap kebijakan politik luar negeri Filipina, pada periode pemerintahannya. *Political personality* yang terdapat dalam pemimpin negara dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan politik luar negeri yang dijalankan Filipina.

### C. Konsep tentang Kawasan

Kawasan dalam bahasa Inggris disebut *region*. Dalam ilmu hubungan internasional, *region* diartikan sebagai kawasan dalam bentuk fisik, yaitu negara-negara yang berdekatan di suatu wilayah. Namun, konsep tentang kawasan dalam ilmu hubungan internasional tidak berhenti pada arti fisik saja, sehingga dikenal istilah *regionalism*. *Regionalism* mengaburkan makna ‘fisik’ dari *region*, dan dapat dikatakan sebagai kumpulan negara yang memiliki berbagai kesamaan, seperti kesamaan budaya, sejarah, kepentingan, dan lain-lain.

Jika berbicara mengenai kawasan, ada tiga istilah kawasan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yaitu *region*, *regionalism*, dan *regionalization*. *Regionalism* lebih kepada sebuah konsep yang dapat menghasilkan suatu kebijakan oleh aktor-aktor wilayah regional. Sedangkan *regionalization* adalah suatu proses atau cara, yang dilakukan para aktor regional yang bekerjasama.

*Region* adalah sebuah wilayah yang di mana aktor di dalamnya mempunyai kesamaan dan memungkinkan sebuah interaksi. Menurut Richard W. Mansbaach, yang dikutip dalam buku *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*, *region*

atau kawasan adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan, dan ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional.<sup>48</sup> Kawasan lebih mengacu pada posisi teritori geografis, batas-batasnya terwujud dan mampu diterjemahkan dengan nyata, sedangkan regionalisme lebih bersifat abstrak, menyangkut ‘ruh’ sebuah kawasan, yaitu sesuatu yang tidak terlihat secara fisik.<sup>49</sup>

Regionalisme adalah konsep dari regional itu sendiri. Dalam sejarahnya, terdapat dua macam regionalisme. Regionalisme lama yang muncul pada tahun 1950-an dan kebanyakan berakar dari permasalahan ekonomi dan keamanan. Kemudian pada tahun 1980-an muncul regionalisme baru yang cakupan permasalahannya lebih luas, seperti politik, lingkungan, dan pembangunan daerah.

Konsep mengenai kawasan menjadi perdebatan oleh para ahli. Beberapa ilmuwan politik berpendapat bahwa *regionalism* adalah proses politik ditandai dengan kerjasama dan koordinasi kebijakan, sedangkan *regionalization* adalah proses ekonomi dimana perdagangan dan investasi di dalam suatu kawasan tumbuh dengan lebih pesat daripada perdagangan dan investasi kawasan dengan negara atau kawasan lain di dunia. Kemudian, Pempel menyatakan hal yang berbeda, namun tetap berhubungan. Ia mengatakan *regionalism* melibatkan proses penciptaan lembaga dan

---

<sup>48</sup> Nuraeni S. dan Deasy Silvy, dan Arfin Sudirman. 2015. *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 1.

<sup>49</sup> Ibid. Hal. 5.

merupakan hasil yang disengaja dari kerjasama antarnegara, sedangkan *regionalization* pada dasarnya sebagai proses pembentukan masyarakat<sup>50</sup>

Selanjutnya, Katzenstein mendefinisikan *regionalism as institutionalized practices and regionalization as “a process that engages actors.”* Akan tetapi, Hurrell menyatakan *regionalization is a feature of regionalism. Regionalization is “the growth of societal integration within a region and....the often undirected processes of social and economic interaction.”*<sup>51</sup> Berbagai peneliti menganggap *regionalization* sebagai proses yang dikendalikan oleh faktor ekonomi atau faktor sosial, sedangkan *regionalism* sebagai proses politik.

Kembali pada definisi awal yang dicetuskan oleh Joseph Nye, ia mendefinisikan *region*, dan kemudian mengembangkannya menjadi *regionalism*, yang tertulis dalam buku *Regionalism & Global Governance: The Emerging Agenda* dan ditulis oleh Timo Behr dan Juha Jokela, sebagai berikut:

*a region consists of “a limited number of states linked by a geographical relationship and by a degree of mutual interdependence”. Regionalism, Nye elaborates, results from “the formation of interstate associations or groupings on the basis of regions.”*<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Edward D. Mansfield dan Etel Solingen. 2010. *Regionalism*. The Annual Review hal. 147. Terdapat dalam [polisci.annualreviews.org](http://polisci.annualreviews.org)

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Timo Behr dan Juha Jokela. 2011. *Regionalism & Global Governance: The Emerging Agenda*. Notre Europe, hal. 4. Terdapat dalam [http://www.institutdelors.eu/media/regionalism\\_globalgovernance\\_t.behr-j.jokela\\_ne\\_july2011\\_01.pdf?pdf=ok](http://www.institutdelors.eu/media/regionalism_globalgovernance_t.behr-j.jokela_ne_july2011_01.pdf?pdf=ok)

Dapat dikatakan bahwa regionalisme pada masa sekarang ini dikendalikan oleh interaksi negara dan aktor non-negara, seperti organisasi, korporasi multinasional, serta aktor internasional lainnya dalam mengejar kepentingan nasional.

Kemudian, Breslin dan Higgott mengatakan bahwa regionalisme merepresentasikan: *“those state-led projects of cooperation that emerge as a result of intergovernmental dialogue and treaties.”*<sup>53</sup> Jadi, menurut para ahli, regionalisme berbicara mengenai hubungan dan kerjasama antarnegara yang berada dalam suatu wilayah yang sama dan membentuk suatu perjanjian ataupun kesepakatan bersama dalam rangka memenuhi kepentingan nasional negara masing-masing.

Menurut Louis Cantori dan Steven Spiegel mendefinisikan:

“Kawasan adalah dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial, sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan.”<sup>54</sup>

Terbentuknya suatu kawasan dipengaruhi oleh adanya kesamaan etnis, ras, bahasa, budaya, agama, dan sejarah, kesadaran ekonomi, kohesifitas politik dan organisasi, kepentingan bersama, serta independensia kawasan (saling ketergantungan dalam kawasan). Sebagai contoh, kawasan Asia Tenggara yang kemudian membentuk organisasi regional. Negara-negara dalam kawasan ini tidak memiliki kesamaan budaya, agama, maupun budaya. Justru ASEAN sangat beragam dalam

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 104.

ketiga faktor tersebut. Akan tetapi, yang menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini adalah kepentingan yang sama, yaitu untuk membendung efek domino dari atas yang dilancarkan oleh negara-negara penganut ideologi komunis dan liberal, yang jika dibiarkan masuk dalam kawasan maka akan mempengaruhi negara-negara yang ada di dalam kawasan tersebut.

Demikian juga dalam suatu kawasan, terutama jika sudah terbentuk organisasi regional yang memiliki kesepakatan bersama, maka tindakan atau keputusan suatu negara akan mempengaruhi negara lainnya di kawasan yang sama. Karena negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kewajiban yang sama, yaitu menjaga stabilitas kawasan.

Dalam isu Laut Cina Selatan, kepentingan kawasan adalah hal yang penting yang harus diperhatikan. Hal ini karena Laut Cina Selatan termasuk dalam kawasan Asia Tenggara dan melibatkan beberapa negara dalam kawasan Asia Tenggara. Laut Cina Selatan berbatasan dengan beberapa negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Masing-masing negara mengklaim masing-masing wilayah perairan yang berbatasan dengan wilayah negaranya sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negara mereka, termasuk RRT dan Filipina, serta negara-negara ASEAN lainnya. Karena itu, tindakan dan kebijakan negara-negara yang terkait dalam klaim wilayah perairan ini akan ikut mempengaruhi stabilitas kawasan yang melingkupi Laut Cina Selatan ini.

Selain itu, kepemimpinan Filipina sebagai ketua ASEAN pada tahun 2017, juga membawa pengaruh jalannya organisasi regional ini. Mengingat bahwa Filipina

berdiri di garis depan dalam ASEAN, serta sebagai salah satu negara yang memiliki peran yang penting dalam konflik Laut Cina Selatan, maka setiap kebijakannya sangat mempengaruhi langkah-langkah yang diambil ASEAN ke depannya. Seperti yang dikatakan bahwa dalam suatu kawasan ada keterkaitan sosial dan perasaan akan kesamaan identitas, maka efek dari kebijakan suatu negara akan berpengaruh dalam kawasan, termasuk mengenai stabilitas kawasan. Untuk itu, sangat penting untuk dapat merumuskan kebijakan dengan mempertimbangkan kepentingan kawasan namun tidak mengabaikan kepentingan nasional negara masing-masing.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRESIDEN RODRIGO DUTERTE DAN LAUT CINA SELATAN**

**A. Kebijakan Politik Luar Negeri Presiden Rodrigo Duterte**

Kebijakan politik luar negeri terbentuk dengan berbagai pengaruh dalam suatu negara. Kepentingan nasional menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Selain itu, faktor kepemimpinan dalam suatu negara juga menentukan jalannya kebijakan politik luar negerinya.

Sebagaimana yang terjadi di negara Filipina, dimana jalannya pemerintahan negara Filipina, sangat bergantung pada peran Presiden sebagai pembuat keputusan dan kebijakan. Meskipun tetap ada peran dari pemangku jabatan pemerintahan yang telah ditetapkan, akan tetapi, Presiden yang berkuasa memiliki pengaruh yang dominan dalam penentuan kebijakan, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. *Political personality*, yaitu kepribadian, pengalaman, dan pengetahuan sang Presiden, khususnya dalam bidang politik, akan mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang diambilnya.

Memasuki masa pemerintahan yang baru, Filipina dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte, sebagai Presiden Filipina ke-16, yang memulai kebijakan-kebijakan yang berbeda dari yang sebelumnya. Hal yang dapat dilihat, bahwa kebijakan setiap periode pemerintahan akan berbeda dan terus mengalami perubahan, karena gagasan, pemikiran dan juga kepribadian masing-masing pemimpin juga berbeda. Kebijakan



politik luar negeri Filipina juga terbentuk berdasarkan keadaan atau situasi negara pada saat tertentu, serta dipengaruhi oleh tindakan atau kebijakan negara lain yang berhubungan dengan Filipina.

## **1. Dasar Kebijakan**

Kebijakan politik luar negeri Filipina telah melalui perjalanan panjang dari masa ke masa. Kebijakan politik luar negeri Filipina yang selama ini dijalankan memiliki korelasi dengan persoalan domestik Filipina, seperti yang terjadi pada negara-negara lain. Kebijakan politik luar negeri Filipina terbentuk berdasarkan kepentingan nasional Filipina, yang meliputi faktor-faktor penting, yaitu faktor ekonomi, faktor sejarah sosial, dan juga faktor keamanan atau militer.

Selama bertahun-tahun, Filipina menjalin hubungan yang erat dengan Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat merupakan negara yang pernah menjajah Filipina, namun Filipina tetap menghormati Amerika Serikat, bahkan menjadi sekutu Amerika Serikat. Nilai-nilai yang dianut Amerika Serikat banyak mempengaruhi Filipina, baik dalam budaya, maupun kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri.

Dalam bidang ekonomi, Filipina juga bergantung pada bantuan-bantuan dan investasi dari Amerika Serikat. Ketergantungan Filipina dan rakyatnya pada Amerika Serikat relatif besar. Pengalihdayaan proses bisnis pihak ketiga yang dimiliki investor Amerika Serikat di Filipina lebih dari 80 persen. Lebih dari satu

juta warga Filipina bekerja di entitas-entitas bisnis itu. Hasil dari bisnis-bisnis itu pun mencapai lebih dari 20 miliar dollar Amerika Serikat.<sup>55</sup>

Berbeda dengan Amerika Serikat, RRT selama ini belum mampu membangun hubungannya dengan Filipina ke arah yang lebih dalam lagi. Padahal, RRT merupakan negara yang memiliki hubungan sejarah sosial dengan Filipina sebelum pengaruh Amerika Serikat masuk. Bahkan, sesungguhnya, Filipina sangat dipengaruhi oleh budaya dan sejarah RRT. Para sejarawan meyakini bahwa pedagang dari RRT telah menjalankan barang-barangnya di pulau-pulau Filipina sejak abad ke-9. Bahkan lebih jauh lagi, Filipina pernah dipimpin oleh seorang yang memiliki keturunan etnis Tiongkok, yaitu Benigno Aquino III dan Corazon Aquino, ibunya. Namun, dengan semua fakta sejarah dan hubungan Filipina dan RRT tersebut, RRT tetap tidak dapat memanfaatkan hubungan-hubungan tersebut menjadi sesuatu yang lebih penting, yaitu dalam hal kebijakan politik luar negeri.

Dari masa ke masa, kebijakan politik luar negeri Filipina mengikuti dinamika domestik yang terjadi di Filipina, dimana, rakyat Filipina sangat terpengaruh dengan budaya dan nilai-nilai Amerika Serikat. Pemerintah Filipina pun terus mengadakan kerjasama dengan Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dalam kepemimpinan yang berbeda-beda.

---

<sup>55</sup> Benny D. Koestanto. *Pernyataan Keras Sang Presiden*. Harian Kompas. 23 Oktober 2016. Hal. 3.

Filipina dan Amerika Serikat juga menjalin kerjasama dalam bidang militer dengan mengizinkan pangkalan militer Amerika Serikat berada di bagian selatan negara Filipina. Selain itu, kebijakan politik luar negeri Filipina turun-temurun terbentuk dari warisan kolonial Amerika Serikat.<sup>56</sup> Sehingga, Filipina dikenal sebagai sekutu dari Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, dalam isu Laut Cina Selatan, Amerika Serikat berperan penting dalam mendorong upaya-upaya Filipina, dan mendukung Filipina, untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya di Laut Cina Selatan, yang sesuai dengan ZEE, serta melawan pihak-pihak yang terlibat dalam klaim tumpang tindih, termasuk RRT, yaitu dengan membantu memperkuat armada laut Filipina.<sup>57</sup>

Filipina mengambil tindakan untuk mengadukan sengketa perairan dengan RRT ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional PBB atau yang dikenal dengan *Permanent Court of Arbitration (PCA)* pada tahun 2013. RRT selama ini berkeras ingin menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan ini secara bilateral, melalui proses negosiasi. Namun, negosiasi itu dinilai hanya akan memberi posisi lebih menguntungkan bagi RRT sebagai negara yang besar.<sup>58</sup> Karena itu, Filipina mengambil langkah untuk menyerahkan konflik tersebut kepada *PCA*. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino III.

---

<sup>56</sup> Emmanuel Yujuico. 2012. *The Philippines*. Diunduh dari <http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR015/SR015-SEAsia-Yujuico-.pdf>.

<sup>57</sup> Harian Kompas. *Filipina Bersikap: Militer Bersumpah Hadapi Ancaman China*. 22 Februari 2014. Hal. 9.

<sup>58</sup> Ibid.

Kemudian, memasuki masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte sebagai presiden baru Filipina, *PCA* menyatakan hasil keputusannya yang memenangkan Filipina pada perkara ini dan menyatakan bahwa RRT telah melanggar wilayah kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Hal ini tentu menambah geram RRT yang tetap bersikeras terhadap wilayah Laut Cina Selatan yang di klaimnya. Namun, perubahan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte memunculkan reaksi yang sangat berbeda pada masa pemerintahannya, yang diawali dari kebijakan dalam negeri dan berdampak pada kebijakan politik luar negerinya.

Kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte merupakan kebijakan yang lahir dari kepentingan nasional Filipina, yang dirumuskan dalam kebijakan domestiknya. Pada kebijakan domestik Filipina, salah satu kebijakan yang menjadi perhatian dan sorotan dunia yaitu, Presiden Rodrigo Duterte berusaha untuk membersihkan negaranya dari kasus narkoba dengan menggunakan sanksi tegas kepada orang-orang yang terlibat narkoba, yaitu hukuman mati.

Ribuan orang telah meninggal dunia karena sanksi tegas tersebut. Sepertiga dari tersangka kasus narkoba itu tewas di tangan polisi, dan sisanya dibunuh penyerang tak dikenal.<sup>59</sup> Presiden Rodrigo Duterte melakukan berbagai cara untuk menuntaskan kejahatan dan tindakan kriminal di negerinya.

Kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Rodrigo Duterte ini memicu kecaman internasional, termasuk PBB dan Parlemen Uni Eropa, karena dinilai

---

<sup>59</sup> Harian Kompas. *Manila Tolak Intervensi Dunia*. 26 September 2016. Hal. 9.

berlebihan dan melanggar hak asasi manusia.<sup>60</sup> Secara khusus, Amerika Serikat sebagai negara aliansi selama bertahun-tahun, menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan domestik Filipina ini. Pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama, Amerika Serikat ikut mengecam kebijakan Presiden Rodrigo Duterte ini yang dinilai tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, Presiden Rodrigo Duterte tidak mau berkompromi dan tidak mau tunduk pada tekanan internasional.

Hal ini kemudian menyebabkan timbulnya pandangan negatif Presiden Rodrigo Duterte terhadap negara-negara Barat, tanpa terkecuali Amerika Serikat. Hal ini semakin memburuk karena Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan embargo senjata ke Filipina, karena Filipina dianggap melanggar hak asasi manusia dalam kebijakan domestiknya.<sup>61</sup> Presiden Rodrigo Duterte kemudian menyatakan ingin mengakhiri kebijakan politik luar negeri Filipina yang selama ini sangat bergantung kepada Amerika Serikat dan menyatakan bahwa Filipina telah menjalin kembali aliansinya dengan arus ideologi Tiongkok.<sup>62</sup>

Selain itu, kebijakan politik luar negeri Filipina juga lahir dari kepentingan nasional Filipina terkait kehidupan para rakyat Filipina yang juga bergantung pada Laut Cina Selatan, atau yang mereka sebut dengan *West Philippine Sea*. Ketegangan yang terjadi beberapa waktu sebelum Presiden Rodrigo Duterte

---

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Harian Kampus. *Duterte Caci AS Soal Penjualan Senjata*. 04 November 2016. Hal. 9.

<sup>62</sup> Benny D. Koestanto. *Pernyataan Keras Sang Presiden*. 23 Oktober 2016. Hal. 3.

menjabat, menimbulkan kekhawatiran. RRT yang tetap bersikeras tidak mengakui keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional dikhawatirkan akan menggunakan *power*-nya, termasuk dalam bidang militer untuk mencapai apa yang diinginkannya. Hal ini tentu akan mengancam stabilitas kawasan yang justru malah merugikan Filipina, bahkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya.

Kemudian, Presiden Rodrigo Duterte berusaha mencairkan ketegangan antara Filipina dengan RRT, yang sebelumnya sempat memanas setelah Filipina, di bawah pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino III, membawa konflik Laut Cina Selatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional dan dimenangkan oleh Filipina. Presiden Rodrigo Duterte memilih untuk membicarakannya secara bilateral dengan RRT dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih kooperatif dalam menangani kasus terkait Laut Cina Selatan.

Selama masa kampanyenya sebelum menjadi Presiden ke-16 Filipina, Presiden Rodrigo Duterte telah menunjukkan preferensinya yang memilih jalan berdiskusi secara bilateral dengan RRT untuk menjaga ketenteraman di Laut Cina Selatan. Bahkan, hal ini dinyatakannya di tengah sebagian besar rakyat Filipina yang tidak menerima tindakan RRT yang mengklaim dan melakukan aktivitas di wilayah *Scarborough Shoal* yang berjarak 200 km dari Filipina. Kemenangan Presiden Rodrigo Duterte menunjukkan persetujuan rakyat Filipina terhadap

pendekatan baru yang dicanangkannya, terkait konflik Laut Cina Selatan dan hubungan Filipina dan RRT.<sup>63</sup>

Keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional, terkait klaim tumpang tindih Filipina dan RRT di Laut Cina Selatan, menyatakan kemenangan di pihak Filipina, berdasarkan UNCLOS 1982. Filipina menghormati keputusan yang bersejarah ini sebagai sebuah kontribusi yang penting dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan yang terus menerus dilakukan. Filipina juga menyatakan bahwa keputusan ini menegaskan kembali hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Filipina terus mengupayakan penyelesaian konflik Laut Cina Selatan dengan damai, dengan mempromosikan dan meningkatkan perdamaian dan kestabilan dalam kawasan.<sup>64</sup> Akan tetapi, Filipina tidak akan mengesampingkan keputusan yang bersejarah yang diberikan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional (*Permanent Court of Arbitration*).<sup>65</sup>

Selanjutnya, untuk melanjutkan metode pendekatan yang baru dengan RRT, Presiden Rodrigo Duterte mengadakan kunjungan ke RRT, dalam sebuah forum bisnis. Presiden Rodrigo Duterte datang dengan misi untuk menjaga kedamaian dan kestabilan kawasan melalui hubungan yang baik antara kedua negara yang

---

<sup>63</sup> Rommel C. Banlaoi. 2016. *Duterte Presidency: Shift in Philippine-China Relations?*. S. Rajaratman School of International Studies (RSIS) Commentary. No. 121.

<sup>64</sup> Documents on The West Philippine Sea. Statement of the Secretary of Foreign Affairs. 12 Juli 2016. Terdapat dalam <http://www.dfa.gov.ph/documents-on-the-west-philippine-sea>. Diakses pada 30 Januari 2017.

<sup>65</sup> Patricia Lourdes Viray. *Yasay Reiterates: Duterte will not Deviate from Tribunal Ruling on South China Sea*. Terdapat dalam <http://www.philstar.com/headlines/2016/12/19/1654964/yasay-reiterates-duterte-will-not-deviate-tribunal-ruling-south-china-sea#dMI02yJcWUKvsHoY.99>. Diakses pada 31 Januari 2017.

berdaulat. Presiden Rodrigo Duterte bertujuan untuk dapat menjalin hubungan politik, ekonomi, dan budaya yang lebih dekat dengan RRT.<sup>66</sup>

Dalam kunjungan kenegaraannya di RRT, Presiden Rodrigo Duterte bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan melakukan pembicaraan mengenai hubungan kedua negara. Sebagai hasilnya, kedua negara telah menyetujui dan menandatangani *Joint Statement of the Republic of the Philippines and the People's Republic of China*. Dalam perjanjian tersebut, kedua negara bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk dalam kawasan Laut Cina Selatan. Kedua negara bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di antara masing-masing penjaga-penjaga pantai untuk memperhatikan situasi perairan sekitar, dan juga memperhatikan prinsip kemanusiaan dan lingkungan di Laut Cina Selatan, seperti yang dituliskan dalam *Joint Statement* tersebut, yaitu:

*Both sides commit to enhance cooperation between their respective Coast Guards, to address maritime emergency incidents, as well as humanitarian and environmental concerns in the South China Sea, such as safety of lives and property at sea and the protection and preservation of the marine environment, in accordance with universally recognized principles of international law including the 1982 UNCLOS.*<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Statement of Secretary Perfecto R. Yasay Jr: Praying for Success in the President's China Visit*. Terdapat dalam <http://www.dfa.gov.ph/newsroom/phl-embassies-and-consulates-news/10695-statement-of-secretary-perfecto-r-yasay-jr-on-the-president-s-china-visit>. Diakses pada 30 Januari 2017.

<sup>67</sup> *Joint Statement of the Republic of the Philippines and the People's Republic of China*. Beijing, 21 Oktober 2016. No. 18. Terdapat dalam <http://www.dfa.gov.ph/newsroom/dfa-releases/10748-joint-statement-of-the-republic-of-the-philippines-and-the-people-s-republic-of-china>. Diakses pada 31 Januari 2017.



Presiden Rodrigo Duterte bersama Presiden Xi Jinping telah menandatangani *Memorandum of Understanding* antara *the Philippine Coast Guard* dan *the China Coast Guard* pada pendirian *Joint Coast Guard Committee on Maritime Cooperation*. Hal ini ditindak lanjuti dengan pertemuan yang diadakan kedua negara di Manila untuk mendiskusikan formasi *Joint Coast Guard Committee on Maritime Cooperation*.<sup>68</sup>

Sejak terpilih menjadi Presiden ke-16 Filipina, Presiden Rodrigo Duterte menyadari hubungan Filipina dengan RRT saat itu dalam kondisi yang kurang baik. Presiden Rodrigo Duterte berusaha menyelamatkan hubungan Filipina dan RRT tersebut dan telah memberikan sinyal tentang *Sino-Philippine relations*, yaitu hubungan antara Republik Filipina dan RRT yang sebenarnya sudah terjalin sejak zaman dahulu.

Presiden Rodrigo Duterte ingin menjalin hubungan yang baik dengan RRT dengan mengoptimalkan keuntungan yang lebih besar dan memaksimalkan potensi jangka panjang, mengingat RRT adalah sumber perdagangan impor terbesar, partner perdagangan terbesar kedua, sumber turis, dan pasar ekspor terbesar ketiga bagi Filipina.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Prashanth Parameswaran. *China, Philippines Mull Coast Guard Cooperation*. Terdapat dalam <http://thediplomat.com/2016/12/china-philippines-mull-new-coast-guard-cooperation/>. Diakses pada 31 Januari 2017.

<sup>69</sup> Aaron Rabena. *What a Duterte Government Means for Sino-Philippine Relations*. Terdapat dalam <http://www.rappler.com/views/imho/135568-duterte-government-china-philippines-relations>. Diakses pada 31 Januari 2017.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa dasar dari kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte adalah kepentingan ekonomi dan juga keamanan nasional, khususnya menjaga stabilitas kawasan yang menyangkut Laut Cina Selatan. Presiden Rodrigo Duterte menyadari bahwa RRT dapat memberikan investasi, khususnya dalam bidang infrastruktur, yang sangat dibutuhkan Filipina sebagai salah satu negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, yang berpengaruh dalam terbentuknya kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte adalah kritik yang muncul dari Amerika Serikat mengenai kebijakan domestiknya dalam usaha memberantas kasus narkoba yang merajalela di Filipina. Kritik tersebut menjadi daya pendorong yang lebih jauh bagi Filipina untuk menolak pengaruh Amerika Serikat, seperti yang dikatakan oleh Carl Baker, direktur program *U.S. think tank CSIS Pacific Forum*: “*He believes that establishing stronger ties with China and Russia will give him greater freedom to ignore U.S. demands regarding defense priorities.*”<sup>70</sup> Presiden Rodrigo Duterte menginginkan iklim yang mendukungnya dalam menjalankan kebijakannya, yang kemudian dilakukan oleh RRT yang memberikan dukungan dan bantuan kepada pemerintah Filipina.

Lebih lanjut, kepentingan nasional tetap menjadi faktor utama dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya. Hal ini terbukti dengan reaksi Presiden Rodrigo Duterte yang tidak ingin dicampuri dalam urusan domestiknya

---

<sup>70</sup> Ibid.

mengambil tindakan untuk menjauh dari pengaruh Amerika Serikat dan tidak ingin lagi bergantung pada kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, demi berlangsungnya kebijakan domestiknya yang merupakan kepentingan nasional Filipina.

Selain kepentingan dan keamanan nasional, faktor lain yang mendasari kebijakan politik luar negeri Filipina adalah kepribadian dari Presiden Rodrigo Duterte itu sendiri. Kepribadian Presiden Rodrigo Duterte sekarang ini terbentuk karena sejarah sosialnya dan juga pengalaman-pengalamannya. Presiden Rodrigo Duterte menjabat sebagai walikota Davao selama 22 tahun berturut-turut sebelum ia mengikuti pemilihan presiden 2016.

Dalam kepemimpinannya sebagai walikota Davao, Presiden Rodrigo Duterte berhasil mengubah kota Davao yang sebelumnya dijuluki sebagai “*murder capital of the Philippines*” menjadi salah satu “*safest place in the world*.”<sup>71</sup> Pengalamannya dalam memberantas tindakan kriminal mendapat kepercayaan rakyat yang dipimpinnya. Karena faktor kepercayaan itulah, yang ikut membentuk kebijakan-kebijakan Presiden Rodrigo Duterte, termasuk kebijakan *war on drugs* yang sedang dijalankannya.

Presiden Rodrigo Duterte ingin memberantas semua pelaku-pelaku kriminal didasari pada pengalamannya yang diakuinya pernah mengalami pelecehan

---

<sup>71</sup> Ju Hailong. 2016. *Will Duterte Overturn His Predecessor's Legacy?*. Terdapat dalam China International Studies July/August 2016 hal. 8.

seksual semasa kecilnya.<sup>72</sup> Pengalaman tersebut membentuk persepsi Presiden Rodrigo Duterte yang membenci kejahatan dan harus diberantas karena dapat merusak moral penerus bangsa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pembentukan kebijakan politik luar negeri Filipina didominasi oleh kekuasaan pemimpin negara, dalam hal ini adalah Presiden yang sedang memegang jabatan. Oleh karena itu, kebijakan politik luar negeri Filipina juga terbentuk didasarkan pada pandangan dan nilai-nilai yang secara pribadi dianut oleh Presiden Rodrigo Duterte sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Filipina. Kebijakan politik luar negeri Filipina akan cenderung dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman politik dan kepribadian Presiden Rodrigo Duterte daripada senat ataupun kementerian luar negeri yang sama-sama relevan dalam pembentukan kebijakan politik luar negeri Filipina.

Kepribadian Presiden Rodrigo Duterte yang juga ikut menentukan pembentukan kebijakan politik luar negeri Filipina ini, terbentuk dari sebuah lingkungan sosial tempat ia bertumbuh sejak kecil. Presiden Rodrigo Duterte sejak kecil telah terbiasa hidup dalam keluarga yang memiliki kekuasaan di Filipina.

Ayahnya, Vincent Duterte, pernah menjabat sebagai gubernur sebuah provinsi yang dulunya bernama Davao. Situasi ini yang membentuk Presiden Rodrigo Duterte menjadi sosok yang tidak mau tunduk pada tekanan orang lain,

---

<sup>72</sup> *Duterte War on Drugs Sexual Abuse Crackdown Human Rights*. Terdapat dalam <http://www.independent.co.uk/news/world/asia/philippines-duterte-war-on-drugs-sexual-abuse-crackdown-human-rights-a7366941.html>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2016.

terlihat dari responnya terhadap reaksi internasional, khususnya negara-negara Barat yang berusaha menghentikan kebijakan domestiknya dalam memberantas narkoba di Filipina.

Presiden Rodrigo Duterte juga hidup dalam kawasan Asia Tenggara, dimana aspek keamanan menjadi hal yang sangat diperhatikan, sehingga masing-masing negara memperhatikan dan memperjuangkan kepentingannya. Kemudian, pengalamannya menjadi walikota selama 22 tahun, yang memberikan kedudukan yang sama kepada setiap pemimpin daerah untuk bebas mengatur daerahnya masing-masing, terbawa hingga ia menjadi Presiden.

Dimana, Presiden Rodrigo Duterte meyakini bahwa setiap negara itu independen dan berhak menyelesaikan urusan dalam negerinya tanpa intervensi dari pihak luar. Presiden Rodrigo Duterte tidak ingin memberikan status khusus kepada pihak manapun untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan yang dijalankan Filipina, termasuk Amerika Serikat.

Jadi, berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, khususnya dalam konflik Laut Cina Selatan, didasarkan pada kepentingan nasional, kepentingan ekonomi, stabilitas kawasan, serta yang tak kalah pentingnya adalah faktor kepribadian Presiden Rodrigo Duterte itu sendiri.

Filipina menerapkan *multi-country foreign policy*, untuk menciptakan stabilitas dalam kawasan yang menjadi tanggung jawabnya, terutama pada masa kepemimpinan Filipina di ASEAN 2017. Filipina juga memilih untuk tidak

bergantung pada kebijakan politik luar negeri suatu negara (*independent foreign policy*), termasuk Amerika Serikat, untuk dapat dengan leluasa memperjuangkan kepentingan nasional negaranya dalam dunia internasional.

## **2. Tujuan Kebijakan**

Kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dirumuskan dengan memiliki arah dan tujuan yang berfokus kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, serta kemajuan negaranya. Presiden Rodrigo Duterte mengedepankan kepentingan nasional negaranya dan menggaris bawahi beberapa permasalahan domestiknya yang perlu diatasi dengan segera, yang selama ini cukup menyusahkan negara Filipina, yaitu dengan menekankan pada pemberantasan masalah korupsi, kriminalitas di jalan-jalan, dan perdagangan narkoba yang merajalela, yang harus segera diatasi.<sup>73</sup> Presiden Rodrigo Duterte juga ingin menegakkan hukum yang seadil-adilnya, yang selama ini dinilai telah melemah karena tingginya angka korupsi, kriminalitas, dan perdagangan narkoba.

Kebijakannya dalam mengatasi permasalahan dalam negeri Filipina menuai kontroversi. Ada yang beranggapan bahwa metode Presiden Rodrigo Duterte dalam memberantas kejahatan tidaklah lazim dan dapat dikatakan illegal. Namun, Presiden Rodrigo Duterte menjelaskan betapa tindakan-tindakan yang melanggar

---

<sup>73</sup> Inaugural Address of Presiden Rodrigo Roa Duterte. Delivered at The Riza Hall, Malacanang Palace, 30 Juni 2016.

hukum tersebut telah begitu menghancurkan negerinya dan merusak moral bangsa. Jika tidak ada tindakan yang benar-benar tegas, maka perubahan tidak akan terjadi dan akan tetap sama seperti itu.

Sehubungan dengan itu, dalam upacara pelantikannya sebagai Presiden ke-16 Filipina, Presiden Rodrigo Duterte menyampaikan apa yang menjadi target dan tujuan dari kebijakan-kebijakan yang diambilnya melalui pidatonya. Beliau mengatakan:

*“Malasakit, Tunay na Pagbabago; Tinud-anay (real) nga Kausaban (change)”. These are words which catapulted me to the presidency. These slogans were conceptualized not for the sole purpose of securing the votes of the electorate. Tinud-anay nga kabag-uhan (real change). Mao kana ang tumong sa atong pang-gobyerno (this is the direction of our government).”<sup>74</sup>*

Melalui pernyataan tersebut, Presiden Rodrigo Duterte menunjukkan tekadnya untuk membawa perubahan di negara Filipina. *“Real change, this is the direction of our government”*, itulah yang dikatakan Presiden Rodrigo Duterte dan sedang berusaha diwujudkannya melalui setiap kebijakannya, baik kebijakan domestik, maupun kebijakan politik luar negerinya.

Kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte bersifat independen. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kekuatan dari aliansi lama Filipina, yaitu Amerika Serikat dengan negara-negara

---

<sup>74</sup> Ibid.

berkekuatan besar lainnya, seperti RRT, Jepang, dan Rusia.<sup>75</sup> Kebijakan independen juga berarti Filipina tidak ingin lagi bergantung pada kebijakan politik luar negeri dari negara lain, seperti yang terjadi sebelumnya, dimana Filipina bergantung pada Amerika Serikat dalam pelaksanaan politik luar negerinya.

Dexter Feliciano, pendiri dari MyLegalWhiz, sebuah *advice service* di Metro Manila, mengatakan:

*“We are pursuing an independent foreign policy. That does not mean we'll break traditional alliances like with the U.S. We just want to have friendlier relations with other countries for the benefit of our country. Our attitude towards other countries is dependent on the respect, support and cooperation they give to our country's advocacy and policies.”*<sup>76</sup>

Pernyataan Dexter Feliciano tersebut menggambarkan tujuan kebijakan politik luar negeri Filipina yang independen bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hubungan-hubungan yang dijalin bersama negara-negara *super power* tersebut. Keuntungan tersebut dapat berupa stabilitas kawasan, kepentingan ekonomi, dan sebagainya. Dengan kata lain, Filipina meyakini bahwa hubungan yang baik dengan semua negara, mendatangkan keuntungan, bahkan lebih banyak lagi, daripada hanya berpihak atau bergantung pada salah satu negara. Selain itu, pada pernyataan tersebut ditekankan bahwa sikap Filipina terhadap negara-negara lain bergantung pada respon negara-negara tersebut dalam mendukung kebijakan-

---

<sup>75</sup> Ralph Jennings. *The One Real Foreign Policy Goal of Today's Volatile Philippine*. Terdapat dalam [www.forbes.com/sites/ralphjennings/2016/11/3/philippine-presidents-real-foreign-policy-goal/#19ffacbe60b0](http://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2016/11/3/philippine-presidents-real-foreign-policy-goal/#19ffacbe60b0). Diakses pada 31 Januari 2017.

<sup>76</sup> Ibid.



kebijakan Filipina. Jelas yang dimaksud adalah Filipina menginginkan iklim yang mendukung kebijakan-kebijakannya.

Itulah sebabnya, Filipina mulai menjauh dari pengaruh Amerika Serikat. Bahkan terlihat lebih jelas setelah Amerika Serikat, di bawah pimpinan mantan Presiden Barrack Obama, tidak mendukung kebijakan domestik yang dijalankan Presiden Rodrigo Duterte dalam menghukum orang-orang yang terlibat narkoba. Sebaliknya, Filipina mulai mendekati RRT, yang telah menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Filipina tersebut.

Kemudian, mengenai isu Laut Cina Selatan, Presiden Rodrigo Duterte menyatakan tidak ingin menyelesaikannya melalui Mahkamah Arbitrase Internasional. Presiden Rodrigo Duterte menekankan bahwa ia tidak akan berperang melawan RRT dan dengan rela untuk mengeksplor minyak dan gas di Laut Cina Selatan dengan RRT melalui *joint ventures* dan menyambut RRT untuk meningkatkan infrastruktur Filipina.<sup>77</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte juga mengarah kepada pembangunan negara, dalam hal ini adalah perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan salah satu permasalahan domestik Filipina adalah kurangnya modal untuk pembangunan, yang menyebabkan masih banyak terdapat pengangguran dan juga infrastruktur yang kurang. Sehingga, mantan

---

<sup>77</sup> Pia Ranada. *Duterte Open to Joint Exploration with China in West PH Sea*. Rappler. 05 Februari 2016. Terdapat dalam Ju Hailong. 2016. *Will Duterte Overturn His Predecessor's Legacy?*. Terdapat dalam China International Studies July/August 2016 hal. 12.

Presiden Filipina, Benigno Aquino III, mengambil keputusan akhir pada masa pemerintahannya yaitu bergabung dengan *the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*.<sup>78</sup>

Kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte mengenai Laut Cina Selatan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Presiden Rodrigo Duterte mengidentifikasi kebutuhan rakyatnya yang menginginkan kemajuan dalam hal ekonomi dan menggunakan pendekatan politik dan ekonomi dalam membangun hubungan dengan RRT.<sup>79</sup> Faktor ekonomi menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Rodrigo Duterte dalam menjalin hubungan dengan RRT, mengingat RRT merupakan negara *super power* yang juga diperhitungkan selain Amerika Serikat, ditambah lagi dengan dukungan-dukungan pemerintah RRT terhadap kebijakan domestik Filipina, khususnya dalam pemberantasan kasus narkoba.

Dengan begitu, Presiden Rodrigo Duterte mengubah ketegangan yang terjadi antara Filipina dengan RRT terkait konflik Laut Cina Selatan, menjadi kesempatan untuk dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, baik bagi negara Filipina maupun RRT, dan yang juga dapat berdampak pada stabilitas kawasan. Presiden Rodrigo Duterte menjalankan *multi-country foreign policy*, termasuk melalui konflik Laut Cina Selatan.

Hasil keputusan *Permanent Court of Arbitration (PCA)* yang memberi kemenangan kepada Filipina muncul setelah Presiden Rodrigo Duterte menjabat

---

<sup>78</sup> Ju Hailong. 2016. *Will Duterte Overturn His Predecessor's Legacy?*. Terdapat dalam China International Studies July/August 2016 hal. 13.

<sup>79</sup> Ibid.

sebagai Presiden baru Filipina. Berdasarkan keputusan PCA tersebut, Presiden Rodrigo Duterte menyampaikan tanggapannya:

*“With regard to the West Philippine Sea otherwise known as [South] China Sea, we strongly affirm and respect the outcome of the case before the Permanent Court of Arbitration as an important contribution to the ongoing efforts to pursue the peaceful resolution and management of our disputes.”<sup>80</sup>*

Dalam pernyataannya tersebut, Presiden Rodrigo Duterte menyatakan bahwa Filipina menyetujui dan menghargai keputusan tersebut sebagai kontribusi yang penting dalam usaha untuk mencapai resolusi dan penanganan konflik Laut Cina Selatan ini dengan damai. Meskipun demikian, Presiden Rodrigo Duterte tidak menyerang RRT dengan hasil PCA tersebut, melainkan berinisiatif untuk melakukan negosiasi bilateral dengan RRT mengenai hal tersebut. Presiden Rodrigo Duterte rela mengesampingkan pertengkaran kedaulatan dan menggantikannya dengan konsesi ekonomi RRT. Ia menentang ide untuk berperang dengan RRT dan tidak menganjurkan penggunaan kesempatan hukum untuk memaksakan klaim Filipina. Presiden Rodrigo Duterte memilih pendekatan bilateral, yaitu bernegosiasi dengan RRT.

Jadi, dapat dilihat bahwa tujuan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte berfokus pada perubahan yang nyata, demi kepentingan rakyatnya, baik itu di dalam maupun luar negeri. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan Presiden

---

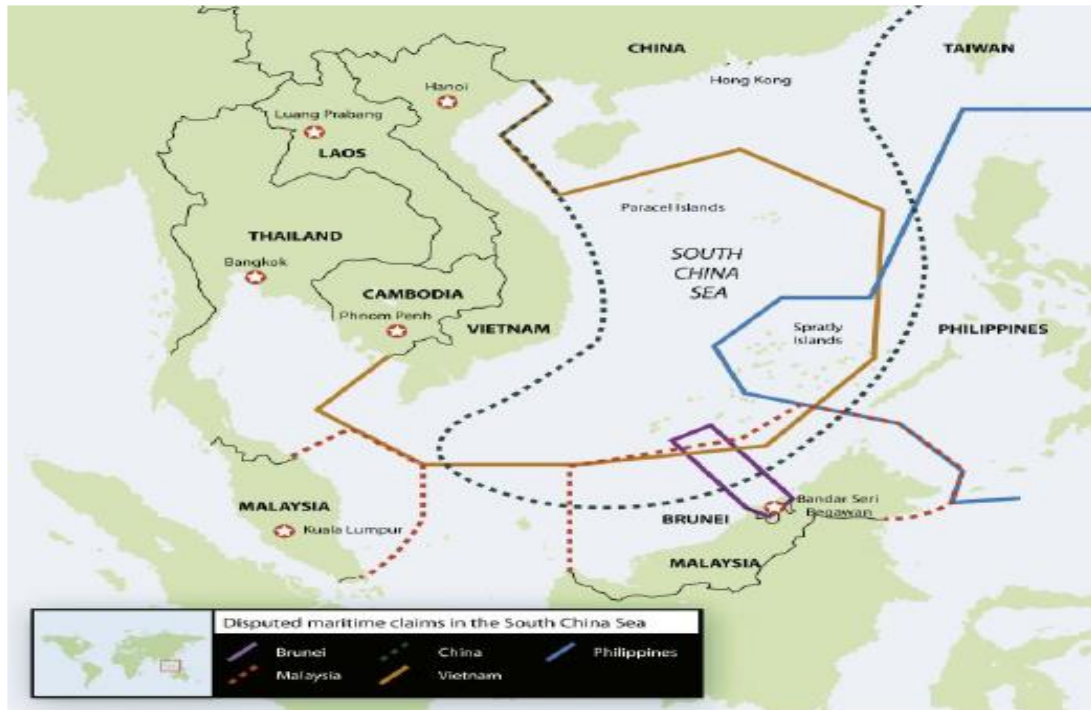
<sup>80</sup> First State of the Nation Address of President Rodrigo Duterte. Terdapat dalam *Arbitration Tribunal Releases Final Award on the South China Sea Case, West Philippine Sea Arbitration Update IX*. Center for International Relations and Strategic Studies, August 2016. Foreign Service Institute of the Philippines.

Rodrigo Duterte menitikberatkan kepada penyelesaian suatu masalah, yang hasilnya benar-benar terlihat secara nyata, dan yang juga menguntungkan negara Filipina. Misalnya dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan, Presiden Rodrigo Duterte memilih menyelesaikannya dengan negosiasi bilateral dengan RRT, karena cara itulah yang dianggap dapat menghasilkan solusi yang lebih baik, sekaligus menguntungkan bagi Filipina.

## **B. Laut Cina Selatan**

Laut Cina Selatan (*South China Sea*) adalah bagian dari samudera Pasifik dan merupakan wilayah perairan yang sangat luas yang meliputi pulau-pulau dan karang-karang. Laut Cina Selatan terletak di jantung Asia Tenggara dan menjadi rute penting untuk transportasi laut dan udara mancanegara. Laut Cina Selatan juga memiliki potensi yang sangat besar karena banyaknya persediaan sumber daya alam di dalamnya.

Akan tetapi, Laut Cina Selatan juga menjadi *flashpoint* di kawasan Asia Tenggara, yaitu sumber konflik yang sewaktu-waktu dapat memicu terjadinya konflik antar negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena beberapa negara yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Laut Cina Selatan mengklaim wilayah negaranya masing-masing berdasarkan ketentuan ZEE. Sedangkan disisi lain, RRT juga mengklaim hampir 90 persen dari wilayah Laut Cina Selatan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya berdasarkan klaim historis. Sehingga, konflik klaim tumpang tindih menjadi hal yang tidak dapat dihindari.



Gambar 1 Klaim Tumpang Tindih Laut Cina Selatan.  
 Sumber: *The South China Sea Disputes July 2016 Update*

Perdebatan dan klaim wilayah telah terjadi selama bertahun-tahun tanpa ada solusi yang jelas. Potensi Laut Cina Selatan yang sangat besar dan juga nilai strategis yang dimilikinya, yang menyebabkan negara-negara yang terkait berusaha mempertahankan bagian Laut Cina Selatan yang di klaimnya demi mencapai kepentingan nasional masing-masing negara, tanpa terkecuali Filipina dan RRT. Untuk itu, perlu dijabarkan potensialitas dan nilai strategis yang dimiliki Laut Cina Selatan.

## 1. Potensialitas Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan adalah wilayah perairan dengan lebih dari 30.000 pulau-pulau kecil dan karang-karang.<sup>81</sup> Secara geografis, Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, yang batas selatannya 3° Lintang Selatan antara Sumatera dan Kalimantan (Selat Karimata), Indonesia, dan batas utaranya adalah Selat Taiwan, dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di RRT. Laut Cina Selatan terletak di sebelah selatan RRT dan Taiwan, di sebelah barat Filipina, di sebelah barat Laut Sabah dan Sarawak (Malaysia), dan Singapura, serta di sebelah timur Vietnam.<sup>82</sup>

Laut Cina Selatan juga dapat dilihat sebagai bagian dari Samudera Pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan yang memiliki luas sekitar 3,5 juta km<sup>2</sup>. Perairan Laut Cina Selatan itu sendiri dikelilingi atau berbatasan langsung dengan sejumlah negara pantai, yaitu RRT, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina.<sup>83</sup>

Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan di dunia yang memiliki potensi yang sangat besar, karena perairan ini kaya akan minyak bumi dan gas alam, serta sumber daya laut lainnya, yang sangat dibutuhkan oleh setiap negara.

---

<sup>81</sup> Jon Lunn dan Arabella Lang. *The South China Sea Dispute: July 2016 Update*. Briefing Paper of House of Commons Library. No. 7481. Hal. 5.

<sup>82</sup> Tzu-Ling Chiang, Chau-Ron Wu, Shenn-Yu Chao. *Physical and geographical origins of the South China Sea Warm Current*. Journal of Geophysical Research: Oceans (1978-2012). Vol. 113. Issue C8. Terdapat dalam Prof. Dr. phil Poltak Partogi Nainggolan, M.A. 2013. *Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. Hal. 115.

<sup>83</sup> Ibid.

Potensi Laut Cina Selatan yang sangat besar ini menyebabkan negara-negara di sekelilingnya berusaha mendapatkan hak kedaulatan atas wilayah yang masing-masing di klaim negara-negara tersebut. Hal ini kemudian memicu terjadinya klaim tumpang tindih dan konflik di antara negara-negara yang bersangkutan.

Di Laut Cina Selatan juga terdapat empat kelompok gugusan kepulauan dan karang-karang, yaitu: Paracel, Spratly, Pratas, dan Kepulauan Maccalesfield. Meskipun konflik teritorial di Laut Cina Selatan tidak hanya mengenai Kepulauan Spratly dan Paracel, namun klaim multilateral atas Spratly dan Paracel lebih menonjol. Kepulauan Spratly merupakan gugusan pulau yang termasuk dalam kawasan Laut Cina Selatan, yang diklaim oleh enam negara, yaitu RRT, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Sedangkan Kepulauan Paracel, dan juga Pratas, masing-masing secara efektif berada di bawah kendali RRT dan Taiwan.<sup>84</sup>

Kepulauan Spratly yang diklaim oleh enam negara tersebut pada dasarnya, sangat kaya akan minyak dan gas, serta berbagai sumber daya laut lainnya. Ketersediaan minyak dan gas tersebut diperkirakan berkisar antara 1-2 milyar barrel sampai 225 milyar barrel. Estimasi yang lain juga menyebutkan, kandungan minyak di kawasan Laut Cina Selatan sebanyak 213 bbl (*billion barrels*),<sup>85</sup> atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional yang dimiliki Amerika Serikat. Adapun *Energy Information Administration (EIA)* menginformasikan, cadangan sumber

---

<sup>84</sup> Prof. Dr. phil Poltak Partogi Nainggolan, M.A. 2013. *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. Hal. 116.

<sup>85</sup> Ibid.

daya alam yang terbesar di Laut Cina Selatan adalah gas alam, yang diperhitungkan sekitar 900 triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar.<sup>86</sup> Kemudian, perkiraan menurut *U.S. Energy Information Administration (EIA)*, menunjukkan bahwa sekitar 60% - 70% dari hidrokarbon di Laut Cina Selatan adalah gas. Sementara itu, penggunaan gas alam di wilayah ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% per tahun, selama dua dekade mendatang.<sup>87</sup>

Potensi Laut Cina Selatan yang sangat besar ini menyebabkan negara-negara memperjuangkan klaimnya atas wilayah-wilayah tertentu, baik berdasarkan faktor historis, maupun berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), seperti yang dialami oleh Filipina dan RRT. Selain itu, kebutuhan energi yang diperkirakan akan semakin meningkat setiap tahunnya, menyebabkan negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan cadangan minyak.

Menurut *U.S. Energy Information Administration's (EIA) International Energy Outlook 2014*, RRT, India, dan negara-negara berkembang lainnya di Asia, diproyeksikan menjadi penyebab 72% kenaikan konsumsi minyak dan zat cair lainnya hingga tahun 2040.<sup>88</sup> EIA juga memproyeksikan negara-negara

---

<sup>86</sup> *Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan*. Terdapat dalam BBC Online. Diakses pada 12 Februari 2017.

<sup>87</sup> *South China Sea is a Critical World Trade Route and a Potential Source of Hydrocarbons*. EIA Overview. 07 Februari 2013. Terdapat dalam <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=sc>, diakses pada 12 Februari 2017.

<sup>88</sup> Alexander Metelitsa dan Jeffrey Kupfer. 2014. *Issue Brief: Oil and Gas Resources and Transit Issues in the South China Sea*. Hal. 2. Terdapat dalam U.S. Energy Information Administration. *International Energy Outlook 2014*, DOE/EIA-0484(2014), <http://www.eia.gov/forecasts/ieo>.



tersebut akan meningkatkan konsumsi gas alamnya 3,9% per tahun, dari 10% pemakaian gas di dunia pada tahun 2008, menjadi 19% pemakaian pada tahun 2035 mendatang.<sup>89</sup>

Dapat dilihat bahwa potensi kekayaan alam yang terkandung dalam perairan Laut Cina Selatan sangat besar dan menguntungkan pihak-pihak yang dapat mengelolanya dengan baik. Potensi ini akan terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan akan energi yang berasal dari minyak dan gas alam, serta sumber daya laut lainnya yang dapat dikelola untuk kebutuhan negara-negara di masa mendatang.

## **2. Nilai Strategis Laut Cina Selatan**

Selain berpotensi besar, Laut Cina Selatan juga memiliki nilai yang sangat strategis. Kawasan Laut Cina Selatan merupakan rute perkapalan atau ekspedisi utama di dunia.<sup>90</sup> Diestimasikan bahwa setiap tahun, Laut Cina Selatan memfasilitasi pergerakan lebih dari setengah lalu lintas dari kapal pengangkut minyak.<sup>91</sup>

Kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan strategis yang sangat penting. Laut Cina Selatan berperan sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional.

---

<sup>89</sup> Ibid, terdapat dalam U.S. Energy Information Administration. *Internatonal Energy Outlook 2013*, DOE/EIA-0484(2013). Terdapat dalam <http://www.eia.gov/forecasts/archive/ieo13>.

<sup>90</sup> Jon Lunn dan Arabella Lang. *The South China Sea Dispute: July 2016 Update*. Briefing Paper of House of Commons Library. No. 7481. Hal. 5.

<sup>91</sup> Ibid.

Oleh karena itu, kedaulatan atas gugusan pulau-pulau di Laut Cina Selatan selalu dipersengketakan selama bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan kedudukannya yang strategis, yaitu sangat dekat dengan jalur komunikasi laut (SLOC) yang sangat vital dan sebagai jalur pelayaran perdagangan (SLOT), yang merupakan penghubung antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.<sup>92</sup> Hal ini telah merubah jalur Laut Cina Selatan menjadi rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan dunia berlayar melewati Laut Cina Selatan setiap tahun.

Kawasan ini juga selalu dilewati oleh kapal-kapal berbagai jenis, yang mengangkut sumber energi minyak, batu bara, maupun gas alam, termasuk 70% kebutuhan energi Jepang dan 65% kebutuhan energi RRT. Selain itu, Amerika Serikat juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya.<sup>93</sup>

Menurut Profesor Jamie B. Naval dari *University Philippine Diiliman (UPD)* Filipina, nilai ekonomi perdagangan yang melintasi Laut Cina Selatan per tahunnya mencapai 5,3 triliun USD.<sup>94</sup> Laut Cina Selatan juga menjadi jalur lintasan utama perdagangan dunia yang menjadi jembatan antara kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.

---

<sup>92</sup> Prof. Dr. phil Poltak Partogi Nainggolan, M.A. 2013. *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. Hal. 117.

<sup>93</sup> Dr. Jean-Paul Rodrigue dan Dr. Theo Notteboom. *Global Maritime Routes and Chokepoints*. Terdapat dalam The Geography of Transport System, <http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/appl1en/ch1a2en.html>. Diakses pada 12 Februari 2017.

<sup>94</sup> Nilai Seaborne Trade Laut China Selatan Capai 5,3 T Dolar AS Per Tahun. 2016. Jurnal Maritim, *Indonesia Maritime Cognition*. Terdapat pada [jurnalmaritim.com/2016/11/nilai-seaborne-trade-laut-china-selatan-capai-53-t-dolar-as-per-tahun/](http://jurnalmaritim.com/2016/11/nilai-seaborne-trade-laut-china-selatan-capai-53-t-dolar-as-per-tahun/). Diakses pada 07 Februari 2017.

Nilai strategis yang dimiliki Laut Cina Selatan ini menjadi faktor yang memicu terjadinya konflik antara negara-negara kawasan, bahkan secara global. Berbagai negara membawa kepentingannya dan berusaha mendapatkan keuntungan dari kawasan Laut Cina Selatan ini. Bahkan RRT mengklaim hampir seluruh bagian dari Laut Cina Selatan ini. RRT kemudian melakukan tindakan pendudukan pada beberapa bagian dari Laut Cina Selatan, termasuk pada *Scarborough Shoal* yang merupakan wilayah yang di klaim Filipina berdasarkan ketentuan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE).

Hal tersebut menyebabkan Filipina akhirnya membawa kasus ini ke *Permanent Court of Arbitration (PCA)*, yaitu pada masa pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino III. *PCA* pun mengeluarkan keputusannya yang memihak pada Filipina, tepat setelah Presiden Rodrigo Duterte terpilih menjadi Presiden Filipina yang baru. *PCA* telah menyatakan bahwa RRT telah melanggar wilayah kedaulatan Filipina dalam ZEE-nya, dengan mengganggu pemancingan dan eksplorasi minyak, serta membangun pulau buatan dan tidak mencegah pemancing RRT untuk memancing di wilayah tersebut.<sup>95</sup> Akan tetapi, Presiden Rodrigo Duterte tidak ingin merusak hubungan dengan RRT yang bersikeras tidak mengakui hasil keputusan *PCA* tersebut.

Nilai strategis Laut Cina Selatan ini membuat negara-negara di dunia ikut mengambil bagian dalam isu ini, termasuk Amerika Serikat yang memberikan

---

<sup>95</sup> Yanmei Xie. 2016. *Landmark South China Sea Ruling Could Revive Negotiations*. International Crisis Group. Terdapat dalam <https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/china/landmark-south-china-sea-ruling-could-revive-negotiations>. Diakses pada 12 Februari 2017.

bantuan kepada Filipina, dalam hal militer keamanan. Hal ini sudah terjalin dalam beberapa tahun, termasuk pada masa pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino. Namun, memasuki masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Filipina tidak lagi bergantung pada pihak manapun, khususnya terkait isu Laut Cina Selatan. Bahkan, Presiden Rodrigo Duterte berusaha menjauhkan pengaruh Amerika Serikat dari konflik Laut Cina Selatan ini.

Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang sangat strategis, terutama di sekitar kepulauan Spratly, karena lokasi tersebut merupakan titik strategis bagi negara-negara untuk dapat melancarkan dominasinya. Kawasan Laut Cina Selatan ini sesungguhnya telah menjadi geopolitik antara kedua negara berkekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan RRT. Itulah sebabnya, RRT membangun pulau-pulau buatan dan bangunan-bangunan di sekitar kepulauan Spratly ini. Selain itu, dengan mendirikan bangunan-bangunan yang diperkirakan ke arah militer, RRT dapat membendung atau bahkan menyeimbangkan kekuatan dengan Amerika Serikat yang terlebih dahulu memiliki pangkalan militer di bagian Selatan Filipina, yaitu di Provinsi Mindanao.

Nilai strategis yang diperkirakan akan terus meningkat ini, akan menjadi hal yang mendapat perhatian bagi negara-negara dengan berbagai kepentingan, untuk dapat tetap mengambil keuntungan dari nilai strategis Laut Cina Selatan ini.

**BAB IV**  
**WUJUD KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI**  
**PRESIDEN RODRIGO DUTERTE**

**A. Kooperatif**

Filipina memulai kembali babak baru dalam kebijakan politik luar negerinya pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Presiden Rodrigo Duterte merumuskan kebijakan-kebijakan yang berbeda dari pendahulunya, yaitu mantan Presiden Benigno Aquino III, termasuk dalam kebijakan politik luar negerinya. Presiden Rodrigo Duterte menjalankan kebijakan politik luar negeri yang independen pada masa pemerintahannya. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Rodrigo Duterte menjelaskan tidak ingin bergantung pada kebijakan politik luar negeri dari negara lain, termasuk dengan Amerika Serikat, yang selama ini beraliansi dengan Filipina.

Kebijakan politik luar negeri yang paling menjadi sorotan adalah kebijakan politik luar negeri Filipina terkait isu Laut Cina Selatan. Jika mantan Presiden Benigno Aquino III menerapkan *hard-line foreign policy*, Presiden Rodrigo Duterte malah sebaliknya. Hal ini diakui oleh Zhu Feng, seorang direktur dari *China Centre for Collaborative Studies of the South China Sea*, yang berpendapat: “*There has been a stark change in the Philippines’ attitude toward the South China Sea arbitration after Aquino left office*”.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> *Permanent Court of Arbitration Decision on the South China Sea*. Australia-China Relations Institute. University of Technology, Sydney, on July 2016.

Pihak RRT pun mengakui perubahan drastis dari kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, khususnya kebijakan mengenai Laut Cina Selatan. Bahkan, pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte ini, oleh RRT, dinilai lebih baik dari pendahulunya, Benigno Aquino III. Presiden Rodrigo Duterte dalam pandangan RRT, tidak hanya memiliki kapabilitas dalam pembuatan dan penentuan kebijakan, tetapi juga dapat memainkan ketentuan dalam permainan politik dengan baik.<sup>97</sup> Hal ini menunjukkan dampak yang positif dari wujud kebijakan politik luar negeri Filipina yang lebih bersikap kooperatif. Filipina mulai dapat diperhitungkan oleh RRT melalui kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte.

Presiden Rodrigo Duterte telah menunjukkan kebijakannya terhadap RRT dalam suatu pertemuan langsung antara RRT dan Filipina, ia mengatakan: *"I have a similar position as China's. I don't believe in solving the conflict through an international tribunal."*<sup>98</sup> Presiden Rodrigo Duterte tidak ingin menyelesaikan konflik tentang Laut Cina Selatan melalui pengadilan internasional.

Pernyataan Presiden Rodrigo Duterte ini menunjukkan kecenderungan Presiden Rodrigo Duterte untuk bersikap lebih kooperatif dalam hubungan Filipina dengan RRT. Dengan menunjukkan kesamaan posisi untuk tidak menyelesaikan konflik melalui pengadilan internasional, Filipina berusaha menarik perhatian RRT

---

<sup>97</sup> Ju Hailong. 2016. *Will Duterte Overturn His Predecessor's Legacy?* Terdapat dalam China International Studies July/August 2016. Hal. 9.

<sup>98</sup> Ibid.

dan menjadikan RRT kawan sekerja dalam berbagai bidang kerjasama, yang tentu saja mendatangkan keuntungan bagi negara Filipina.

Ketetapan yang paling penting dalam *Philippine Constitution 1987* yang menyinggung pembentukan kebijakan politik luar negeri Filipina, terdapat pada:

*Article II, Section 2: "The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice."*

*Article II, Section 7: "The State shall pursue an independent foreign policy. In its relations with other states the paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination."*<sup>99</sup>

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kebijakan politik luar negeri Filipina berpatokan pada konstitusi Filipina 1987 yang menyatakan bahwa Filipina meninggalkan perang sebagai sebuah instrumen kebijakan nasional, dan menerima prinsip-prinsip hukum internasional sebagai bagian dari hukum negerinya dan menganut kebijakan yang damai, persamaan, dan keadilan. Hal inilah yang tampaknya berusaha diterapkan Presiden Rodrigo Duterte dalam kebijakan politik luar negerinya.

Karena itu, dalam hubungan dengan RRT terkait konflik Laut Cina Selatan yang memanas pada akhir masa pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino III, Presiden Rodrigo Duterte berusaha mendinginkan suasana dengan tidak memaksakan RRT menerima hasil keputusan *Permanent Court of Arbitration (PCA)*, tetapi

---

<sup>99</sup> *Philippine Foreign Policy. Department of Foreign Affairs, Republic of the Philippines.* Terdapat dalam <https://www.dfa.gov.ph/about-us/phl-foreign-policy>. Diakses pada 12 Februari 2017.

memilih untuk membicarakannya dalam negosiasi bilateral dengan RRT. Meskipun demikian, Presiden Rodrigo Duterte tetap menghargai dan menerima hasil keputusan *PCA* tersebut sebagai keputusan yang penting dalam membantu penyelesaian konflik Laut Cina Selatan.

Selain itu, Presiden Rodrigo Duterte memilih untuk menjalin kerjasama dengan RRT, sekalipun RRT memiliki kepentingan yang lain di Laut Cina Selatan. Sedangkan, Filipina berusaha menjauhkan pengaruh Amerika Serikat dari konflik Laut Cina Selatan tersebut. Hal ini menandakan bahwa Filipina ingin mendapatkan kepercayaan dari pihak RRT, bahwa Filipina tidak lagi berada di bawah pengaruh rival terkuatnya, yaitu Amerika Serikat.

Dengan kepercayaan RRT itu, Filipina dapat membuka peluang yang lebih besar lagi dalam hubungannya dengan RRT, di berbagai bidang. Hal yang penting yang diperhatikan Presiden Rodrigo Duterte juga mengenai kebijakan dalam negerinya dalam memberantas kejahatan transnasional di Filipina. Berbeda dengan respon Amerika Serikat, RRT malah mendukung kebijakan Filipina tersebut dalam upaya pemberantasan narkoba, dengan menawarkan bantuan militer, yang berupa peralatan militer gratis. Total peralatan militer tersebut senilai 14 juta dollar Amerika atau sekitar 188 miliar rupiah. Selain itu, RRT juga menawarkan pinjaman lunak jangka panjang senilai 500 juta dollar Amerika Serikat.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Harian Kompas. *Tiongkok Tawari Duterte Peralatan Militer Gratis*. 22 Desember 2016. Hal. 9.



Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan politik luar negeri RRT yang lunak terhadap Filipina tersebut merupakan produk dari kebijakan politik luar negeri Filipina yang dijalankan Presiden Rodrigo Duterte terkait isu Laut Cina Selatan. Tindakan Presiden Rodrigo Duterte yang kooperatif memicu kebijakan politik luar negeri RRT juga menggunakan cara-cara yang kooperatif dalam berhubungan dengan Filipina.

Kebijakan politik luar negeri yang kooperatif ini dapat menjadi kekuatan bagi Filipina untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kebijakan yang kooperatif dapat membuat lawan menjadi kawan dan membawa keuntungan bagi Filipina. Hal ini yang diterapkan oleh Presiden Rodrigo Duterte dalam mengelola hubungannya dengan RRT, khususnya dalam isu Laut Cina Selatan. RRT akan menjadi lawan yang sangat membahayakan jika dihadapi dengan tindakan yang keras dan memaksa. Apalagi, RRT sebagai negara *superpower* dapat menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk melawan Filipina, sebagai salah satu negara berkembang.

Namun, sebaliknya, jika Filipina menggunakan metode yang lebih bersahabat dalam hubungannya dengan RRT, seperti yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte saat ini, maka RRT dapat menjadi rekan yang baik dalam kerjasama bilateral, juga dalam membantu Filipina dibidang perekonomian. Akan tetapi, dapat dipastikan, RRT tidak akan melepaskan wilayah Laut Cina Selatan yang diklaimnya begitu saja. Namun, RRT tampaknya akan melakukan tindakan kooperatif juga melalui dukungan-dukungan dan bantuan terhadap kebijakan pemerintah Filipina,

untuk tetap dapat memantau wilayah Laut Cina Selatan dan mempertahankan wilayahnya.

Dalam hal inilah kemampuan seorang pemimpin negara dapat dilihat. Presiden Rodrigo Duterte harus pandai dalam melihat kesempatan dan mengambil keputusan yang tepat. Jika pada akhirnya, negosiasi bilateral Filipina dan RRT tidak membuahkan hasil, maka Filipina masih mempunyai pegangan yaitu hasil keputusan *PCA* untuk dapat terus mempertahankan kepentingan negaranya. Filipina juga tetap melakukan filterisasi dalam setiap tawaran-tawaran RRT, dengan menganalisa dampak dari tawaran tersebut.

Kemudian, kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte tidak lepas dari pengaruh kepribadian Presiden Rodrigo Duterte itu sendiri. Presiden Rodrigo Duterte dengan latar belakang kehidupan pribadinya dan pengalaman-pengalamannya, berperan penting dalam perumusan kebijakan politik luar negeri. Kebijakannya dalam menjauhi sekutu lama dan mendekat dengan tetangga yang agresif, bahkan menolak hukum internasional, dinilai oleh sebagian kalangan adalah hal yang tidak bijak dan terlalu terburu-buru.

Akan tetapi, apa yang coba dilakukan Presiden Rodrigo Duterte adalah mencoba untuk bersikap kooperatif menghadapi lawan yang agresif, seperti RRT. Dengan melihat pengalaman pada pemerintahan sebelumnya, sekalipun telah menggunakan *hard-line policy*, RRT bersikeras tidak akan kompromi dan

menyerahkan begitu saja wilayah Laut Cina Selatan yang masing-masing di klaim oleh RRT dan Filipina.

Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte juga berpengaruh pada situasi kawasan, khususnya Asia Tenggara. Secara geopolitik, melalui isu Laut Cina Selatan, Filipina dinilai memiliki peran yang penting. Relasi Filipina dengan negara-negara adidaya, terutama dengan RRT dan Amerika Serikat, akan sangat mempengaruhi hubungan yang akan terjalin antara ASEAN dengan negara-negara tersebut. Pada pemerintahan sebelumnya, Filipina yang memiliki kedekatan khusus dengan Amerika Serikat, mempengaruhi hubungan ASEAN dan Amerika Serikat yang mendekat dan menimbulkan tekanan terhadap RRT dan solidaritas ASEAN mengenai Laut Cina Selatan.

Namun, posisi Filipina sebagai ketua ASEAN 2017 ini dapat mempermudah dan meringankan pembicaraan mengenai konflik Laut Cina Selatan. Hal ini disebabkan karena adanya negara-negara ASEAN yang lebih dekat hubungannya dengan RRT, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan terkait Laut Cina Selatan dalam tubuh ASEAN itu sendiri. Hubungan Filipina dan RRT yang baru, dapat memberi ruang bagi ASEAN untuk lebih netral dengan mengutamakan kepentingan bersama, dalam satu kawasan.

Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte dapat dikatakan sebagai gaya kepemimpinan situasional, yaitu kepemimpinan yang tidak terpaku pada gaya kepemimpinan tunggal, apakah transaksional (menciptakan struktur yang jelas), ataupun transformasional (memberi semangat dan energi ke segala arah, selalu

bersikap positif), tetapi bergantung pada situasi. Presiden Rodrigo Duterte dapat menjadi sangat keras pada kebijakan dalam negerinya untuk memberantas tindakan kriminal yang merajalela dan menyebabkan keterpurukan dalam negerinya. Namun, disisi lain, Presiden Rodrigo Duterte dalam kebijakan politik luar negerinya, bersikap kooperatif menghadapi RRT dalam pertarungan wilayah kedaulatan di Laut Cina Selatan.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan Presiden Rodrigo Duterte melihat situasi-situasi yang terjadi dan mulai menyesuaikan kebijakannya dengan kebutuhan yang ada. Sikap kooperatif menjadi pilihan Presiden Rodrigo Duterte untuk menjaga stabilitas kawasan dan juga karena adanya kepentingan ekonomi, demi tercapainya kepentingan nasional negara Filipina.

Tindakan kooperatif ini terus berlanjut dengan diadakannya pertemuan-pertemuan bilateral dengan RRT, dan juga mengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi, yang menjadi salah satu tujuan dari kebijakan kooperatif oleh Presiden Rodrigo Duterte ini. Sebagai dampak dari tindakan tersebut, kedua negara telah menyetujui dan menandatangani *Joint Statement of the Republic of the Philippines and the People's Republic of China*. Dalam perjanjian tersebut, kedua negara bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk dalam kawasan Laut Cina Selatan. Kedua negara bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di antara masing-masing penjaga-penjaga pantai untuk memperhatikan situasi perairan sekitar, dan juga memperhatikan prinsip kemanusiaan dan lingkungan di Laut Cina Selatan.

Selain itu, Presiden Rodrigo Duterte juga menjalankan kebijakan kooperatifnya dengan RRT demi kepentingan nasional negara Filipina. Hal ini terlihat dari tindakan yang diambil Presiden Rodrigo Duterte yang meminta bantuan militer kepada RRT dalam menangani kasus Abu Sayyaf yang telah menjadi ancaman bagi negara Filipina itu sendiri dan juga negara-negara di sekitarnya.<sup>101</sup> Situasi domestik Filipina ini menjadi bagian dari pertimbangan Presiden Rodrigo Duterte dalam merumuskan kebijakan politik luar negerinya yang kooperatif.

Dengan wujud kebijakan politik luar negeri yang kooperatif, Presiden Rodrigo Duterte mencari iklim yang dapat mendukung kebijakan yang ada di negaranya. RRT adalah negara yang mendukung tindakan Filipina dalam memberantas narkoba dan juga telah menawarkan bantuan senjata militer kepada Filipina terkait tindakan tersebut. Maka dari itu, Presiden Rodrigo Duterte memanfaatkan kesempatan hubungan dengan RRT ini dengan baik, dan kemudian meminta bantuan dari RRT terkait kasus Abu Sayyaf di Filipina. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte yang bersifat kooperatif terhadap RRT, khususnya mengenai kasus Laut Cina Selatan, membuka peluang-peluang kerjasama yang baru dan hubungan yang lebih mendalam dengan RRT, yang juga dapat memenuhi kebutuhan negara Filipina, contohnya saja dalam bidang ekonomi dan keamanan.

Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte terampil dalam menarik kepercayaan rakyat Filipina di awal kepemimpinannya. Hal ini didukung oleh hasil

---

<sup>101</sup> Harian Kompas. *Duterte Minta Bantuan Militer Tiongkok*. 21 Februari 2017. Hal. 10.

jajak pendapat yang dilakukan *Social Weather Stations*, sebuah lembaga survei sosial di Filipina, menunjukkan 76 persen warga mengatakan puas dengan kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte.<sup>102</sup> Survei ini dilakukan pada tiga bulan pertama masa kepemimpinannya. Kepercayaan rakyat Filipina menambah semangat Presiden Rodrigo Duterte untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya, baik dalam maupun luar negeri, tanpa mempedulikan kecaman internasional sekalipun.

Jadi, dapat dilihat bahwa wujud kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte adalah kebijakan yang kooperatif, terkhususnya dalam merespon konflik Laut Cina Selatan dan hubungannya dengan RRT. Lebih lanjut, kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte harus dapat dimainkan dengan bijak, terkhususnya dalam mengatur *multi-country foreign policy*, yaitu menyeimbangkan hubungan antara Filipina dengan Amerika Serikat dan Filipina dengan RRT. Sikap kooperatif perlu juga diseimbangkan dengan kepentingan-kepentingan negara Filipina yang menjadi patokan penting dalam berhubungan dengan negara-negara lain.

## **B. Orientasi Kepentingan Ekonomi**

Pada awal pemerintahannya, kebijakan Presiden Rodrigo Duterte masih tidak menentu dan terkesan berubah-ubah. Hal yang paling mencolok adalah ketika Presiden Rodrigo Duterte menyampaikan perpisahannya dengan Amerika Serikat saat

---

<sup>102</sup> Harian Kompas. *Popularitas Meroket, Duterte Tantang AS dan UE*. 07 Oktober 2016. Hal. 9.

menghadiri forum bisnis di Beijing, RRT.<sup>103</sup> Akan tetapi, pernyataannya tersebut langsung di klarifikasi oleh Menteri Perdagangan Filipina, Ramon Lopez, menyatakan bahwa Presiden Rodrigo Duterte tidak membicarakan perpisahan dengan Washington. Ramon Lopez mengatakan:

“Dalam urusan hubungan dagang, kami tidak akan menghentikannya, begitu juga tentang investasi dengan Amerika Serikat. Presiden menyebut secara khusus keinginannya meningkatkan ikatan dengan Tiongkok dan negara ASEAN, mitra dagang kami selama berabad-abad.”<sup>104</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa Filipina hanya merasa terancam jika terlalu bergantung pada satu sisi. Presiden Rodrigo Duterte juga menjelaskan maksud pernyataannya yaitu Filipina ingin mengakhiri kebijakan luar negerinya yang selama ini sangat bergantung pada Amerika Serikat.

Pada masa pemerintahannya sebagai Presiden Filipina, Presiden Rodrigo Duterte mencanangkan delapan poin agenda ekonomi Filipina<sup>105</sup>, yaitu:

1. Melanjutkan dan mempertahankan kebijakan makroekonomi yang sedang berlangsung saat ini. Akan tetapi, melakukan perbaikan pada usaha pemungutan hasil pajak (dalam Biro Pajak Internal dan Biro Pabean), yang akan dilengkapi dengan perbaikan dalam birokrasi agen pemungutan pajak.

---

<sup>103</sup> Benny D. Koestanto. *Pernyataan Keras Sang Presiden*. Harian Kompas. 23 Oktober 2016. Hal. 3.

<sup>104</sup> Ibid.

<sup>105</sup> Gilberto M. Llanto. 2016. *Duterte Must Be Bold on Economic Policy*. Philippine Institute for Development Studies (PIDS). Development Research News. Vol. 34. No. 2. Hal. 2.

2. Mempercepat pengeluaran infrastruktur dengan menunjukkan, diantara yang lain, kendala utama dalam program kerjasama sektor publik dan swasta. Mempertahankan target yaitu menyisihkan 5% dari *gross domestic product (GDP)* negara pada pembiayaan infrastruktur.
3. Menjamin daya tarik Filipina terhadap investasi asing dengan menyampaikan batasan ketentuan ekonomi dalam Konstitusi dan hukum negara, dan meningkatkan daya saing ekonomi.
4. Mengikuti strategi asli pengembangan pertanian dengan menyediakan bantuan pelayanan kepada petani kecil untuk meningkatkan produktivitas mereka, memperbaiki akses pasarnya, dan mengembangkan rantai nilai pertanian dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan agribisnis.
5. Menyelesaikan kendala administrasi dan sistem manajemen di wilayah Filipina.
6. Memperkuat sistem pendidikan dasar dan menyediakan beasiswa-beasiswa untuk pendidikan ketiga, yang berhubungan dengan kebutuhan akan pekerja-pekerja di sektor swasta.
7. Memperbaiki sistem pajak pemasukan sehingga lebih maju untuk memungkinkan yang memiliki penghasilan yang sedikit, masih mempunyai simpanan uang.
8. Memperluas dan memperbaiki implementasi dari program transfer uang tunai bersyarat.



Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga stabilitas suatu negara. Agenda ekonomi Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte masih tetap mengikuti prinsip kebijakan ekonomi pendahulunya, mantan Presiden Benigno Aquino III, dengan disertai penambahan-penambahan.

Delapan poin perencanaan ekonomi ini menunjukkan adanya kebutuhan ekonomi yang besar dalam negara Filipina, mengingat bahwa Filipina merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, dan masih membutuhkan banyak modal untuk melakukan pembangunan dalam negerinya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang layak dalam negerinya. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Filipina dalam *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* yang merefleksikan kebutuhan negara Filipina yang besar terhadap modal dari RRT untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri.<sup>106</sup>

Menurut Ernest Pernia, *future Planning Master* untuk kabinet Presiden Rodrigo Duterte, program ekonomi Presiden Rodrigo Duterte berfokus pada masalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, yang dapat mengurangi ketidakmerataan ekonomi.<sup>107</sup> Delapan poin agenda ekonomi ini juga berpengaruh dalam pembentukan kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte.

---

<sup>106</sup> Ju Hailong. 2016. *Will Duterte Overturn His Predecessor's Legacy?* Terdapat dalam China International Studies July/August 2016. Hal. 13.

<sup>107</sup> Dr. Detlef Rehn. 2016. *The Philippines Under the New Leadership*. EU-ASIA Economic Governance Forum. Hal. 3.

Kebijakan politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte menunjukkan preferensinya untuk mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Presiden Rodrigo Duterte meyakini bahwa hal ini akan menjadi pertanda yang baik bagi perkembangan sosial dan ekonomi Filipina selama enam tahun ke depan.

Dengan menggandeng RRT dalam berbagai kerjasama di berbagai bidang, Filipina dapat memanfaatkan iklim yang mendukung ini untuk memperbaiki perekonomian Filipina, yang menjadi kebijakan domestik dari Presiden Rodrigo Duterte. Namun, Presiden Rodrigo Duterte harus pandai-pandai mengelola hubungan yang seimbang antara RRT dan juga Amerika Serikat, mengingat kedua negara juga berperan dalam perekonomian Filipina.

Prioritas dari kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte adalah memelihara dan mempertahankan hubungan yang seimbang antara Amerika Serikat dan RRT. Presiden Rodrigo Duterte juga ingin menjalin hubungan yang baik dengan semua negara, termasuk kedua negara *super power* tersebut, dengan menjalankan *multi-country foreign policy* seperti yang telah dilakukan beberapa negara lainnya dalam kawasan Asia Tenggara, yaitu Vietnam dan Indonesia. Dapat dilihat bahwa Presiden Rodrigo Duterte tidak ingin mengambil resiko dengan melawan salah satu pihak dan bersahabat dengan pihak lainnya, yang kemungkinan akan menjadi ancaman bagi negara Filipina itu sendiri maupun bagi stabilitas kawasan.

Mengenai isu Laut Cina Selatan, PCA telah mengeluarkan keputusannya dengan dukungan kepada Filipina. Namun, Presiden Rodrigo Duterte memilih untuk

mengambil pendirian yang lebih ramah atau bersahabat dengan RRT. Hal itu dilakukan Presiden Rodrigo Duterte sebagai usaha untuk menarik investasi dari RRT.<sup>108</sup> Dapat dilihat, bahwa kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte mengenai Laut Cina Selatan juga didasarkan kepada kepentingan ekonomi Filipina.

Jika Filipina meneruskan tuntutanannya terhadap RRT terkait isu Laut Cina Selatan tersebut, maka Filipina kemungkinan akan kehilangan mitra dagang yang cukup membantu perekonomian Filipina dan memiliki potensi yang besar dalam memberikan modal pembangunan infrastruktur bagi Filipina. Tindakan Presiden Rodrigo Duterte ini membuahkan hasil. Setelah semua kemarahan RRT terkait hasil keputusan *PCA* tersebut, RRT menyatakan kembali bahwa RRT masih membuka kerjasama yang lebih besar dalam bidang ekonomi dengan Filipina.<sup>109</sup>

Selain itu, Filipina tetap ingin menjalin hubungan yang baik dengan RRT karena Filipina menyadari bahwa Filipina belum mampu mengelola sumber energi yang terdapat pada Laut Cina Selatan tanpa bantuan dari negara lain yang memiliki kapabilitas yang lebih. Presiden Rodrigo Duterte seolah membiarkan keputusan *PCA* dan menukarkannya dengan modal dan teknologi dari RRT, serta kebebasan dari gangguan RRT. Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte mencoba untuk mengambil keuntungan dalam bidang ekonomi dari hasil keputusan *PCA* tersebut.

---

<sup>108</sup> Jon Lunn dan Steven Ayres. 2016. *The Philippines: September 2016 Update*. House of Commons Library. No. 7710. Hal. 11. Diunduh dari *Philippines Peace Process: Duterte Playing for High Stakes*. The Interpreter. 30 August 2016.

<sup>109</sup> Ibid.

Kecenderungan kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte untuk memperbaiki hubungan antara Filipina dan RRT, dengan mengembangkan hubungan ekonomi antara kedua negara, merupakan pilihan yang sangat pragmatis, mengingat kedua negara memiliki ikatan sejarah yang sudah berabad-abad terjalin. RRT yang dikenal sebagai *the fastest rising power* pada abad ke-21 ini, dapat memberikan Filipina banyak kesempatan ekonomi yang dibutuhkan pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, yaitu dalam memenuhi janjinya kepada rakyat Filipina dalam hal pembangunan infrastruktur, peningkatan perdagangan bilateral, menaikkan sektor pariwisata, meningkatkan angka tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan memperluas pelayanan sosial kepada rakyat Filipina.<sup>110</sup>

Selain itu, RRT juga dapat memberikan iklim yang nyaman bagi Filipina dengan dukungan-dukungan yang diberikan RRT terkait kebijakan domestik Filipina dalam memberantas narkoba, juga dengan menawarkan bantuan senjata, hal yang tidak dapat dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat ini. Sehingga, Presiden Rodrigo Duterte membawa kebijakan politik luar negerinya untuk mendekat dengan RRT, agar kebijakan-kebijakan yang mewakili kepentingan nasional Filipina dapat terealisasi dengan baik.

Jadi, dapat dilihat bahwa kebutuhan mendasar suatu negara terletak juga pada kekuatan ekonomi yang dapat membuat suatu negara berjalan dengan baik. Modal, infrastruktur, teknologi, investasi, kerjasama ekonomi, adalah hal-hal yang

---

<sup>110</sup> Rommel C. Banlaoi. 2016. *Duterte Presidency: Shift in Philippine-China Relations?*. S. Rajaratman School of International Studies (RSIS) Commentary. No. 121.

dibutuhkan oleh Filipina saat ini. Termasuk dalam isu Laut Cina Selatan, sekalipun Filipina memenangkan kasus tersebut di *PCA*, namun tanpa modal dan teknologi untuk mengembangkan wilayah yang diklaimnya tersebut, maka tidak akan mendatangkan keuntungan yang signifikan. Oleh sebab itu, Filipina memilih untuk menggandeng RRT dengan orientasi kepentingan ekonomi, namun tetap berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang melibatkan negara tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang penulis telah uraikan dalam setiap bab tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Filipina pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte tentang Laut Cina Selatan, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kebijakan politik luar negeri Filipina memasuki era yang baru pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Seorang Presiden, dapat menentukan kebijakan dan arah, serta tujuan politik luar negerinya, sesuai dengan konstitusi Filipina. Akan tetapi, kebijakan politik luar negeri Filipina juga menunjukkan ketergantungan yang sangat besar kepada keputusan Presiden, sehingga kepribadian dan nilai-nilai yang dianut Sang Presiden menjadi sangat berpengaruh pada kebijakan politik luar negeri Filipina.
2. Amerika Serikat dan RRT adalah dua negara yang selama ini merupakan sekutu dan seteru bagi Filipina. Dalam kaitannya dengan Laut Cina Selatan, Amerika Serikat adalah sekutu bagi Filipina, dan RRT adalah seterunya, sebagai akibat dari klaim RRT yang menguasai kawasan Laut Cina Selatan, dimana Filipina juga memiliki kepentingan di dalamnya. Namun, masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte menempuh kebijakan baru, yaitu “berpisah dengan Amerika Serikat dan mendekat ke RRT.”

3. Untuk mewujudkan kedekatan Filipina dengan RRT, Presiden Rodrigo Duterte melakukan pendekatan yang bersifat kooperatif dan berorientasi pada kepentingan ekonomi.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Meskipun Presiden memiliki kekuasaan yang prerogatif dalam menentukan kebijakan dan orientasi politik luar negeri Filipina, namun tetap perlu melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada dalam negeri Filipina, sehingga kebijakan yang ditempuhnya merepresentasikan kekuatan nasionalnya.
2. Sebagai salah satu negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara dan merupakan salah satu negara anggota ASEAN, Filipina selayaknya juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara ASEAN lainnya, yang juga memiliki kepentingan serupa di Laut Cina Selatan dan bersengketa dengan RRT.
3. Dalam mewujudkan kepentingannya, Filipina diharapkan untuk tidak mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dalam hubungannya dengan RRT, terutama yang menyangkut kepentingan ekonomi. Akan tetapi, menyelaraskannya dengan kepentingan negara-negara ASEAN lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Anwar, Dewi Fortuna. 2008. *Masalah Keamanan Tradisional di Lingkungan ASEAN dalam Sungkar, Yasmin, Isu-isu Keamanan Strategis dalam Kawasan ASEAN*. Jakarta: LIPI Press.
- Beasley, Ryan K, at al. 2013. *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior*. California: CQ Press.
- Elms, Alan C. 1976. *Personality in Politics*. USA: Harcourt Brace Jovanovich.
- Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri*. Bandung: Nuansa.
- Hill, Christopher. 2003. *The Changing Politics of Foreign Policy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, ed. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nainggolan, phil Poltak Partogi. 2013. *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. Hal. 115.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 104.
- S, Nuraeni dan Deasy Silvy, dan Arfin Sudirman. 2015. *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saban, Nabila dan Anak Agung Banyu Perwita. 2015. *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



Sarwono, Sarlito Wirawan. 2005. *Psikologi Sosial, Individu, dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka. Terdapat dalam Muhammad Alfian Alfian. 2016. *Wawasan Kepemimpinan Politik*. Bekasi: Penjuru Ilmu Sejati.

Smith, Steve dan Amelia Hadfield, dan Tim Dunne. 2012. *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Second Edition)*. New York: Oxford University Press.

**B. Jurnal-jurnal:**

Banlaoi, Rommel C. 2016. *Duterte Presidency: Shift in Philippine-China Relations?* S. Rajaratman School of International Studies (RSIS) Commentary. No. 121.

Behr, Timo, dan Juha Jokela. 2011. *Regionalism & Global Governance: The Emerging Agenda*, Notre Europe. Terdapat dalam [http://www.institutdelors.eu/media/regionalism\\_globalgovernance\\_t.behr-j.jokela\\_ne\\_july2011\\_01.pdf?pdf=ok](http://www.institutdelors.eu/media/regionalism_globalgovernance_t.behr-j.jokela_ne_july2011_01.pdf?pdf=ok).

Central for Strategic and International Studies. *The Domestic Sources of Foreign Policy* dalam The Indonesian Quarterly. Vol. 42 No. 3-4, 2014.

Dharmaputra, Radityo dan Dias Pabyantara. 2015. *Analisis Politik Luar Negeri: Tinjauan Mikro ke Makro*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.

Greenstein, Fred I. 1992. *Can Personality and Politics Be Studied Systematically?* dalam *Political Psychology*, Vol. 13, No. 1. International Society of Political Psychology.

Hailong, Ju. 2016. *Will Duterte Overturn His Predecessor's Legacy?* Terdapat dalam China International Studies July/August 2016.

Heydarian, Richard Javad. 2016. *What Duterte Portends for Philippine Foreign Policy*. S. Rajaratman School of International Studies (RSIS) Commentary, No. 123.

Holsti, K. 1970. *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. *International Studies Quarterly*, Vol. 14 No. 3. Diakses pada [https://www.jstor.org/stable/3013584?seq=23#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/3013584?seq=23#page_scan_tab_contents).

Lane, Robert E. 2008. *The Study of Political Personality*. International Encyclopedia of the Social Sciences. Terdapat dalam <http://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/personality-political>

Llanto, Gilberto M. 2016. *Duterte Must Be Bold on Economic Policy*. Philippine Institute for Development Studies (PIDS), Development Research News. Vol. 34. No. 2

Lunn, Jon, dan Arabella Lang. 2016. *The South China Sea Dispute: July 2016 Update*. Briefing Paper of House of Commons Library. No. 7481.

Lunn, Jon, dan Steven Ayres. 2016. *The Philippines: September 2016 Update*. House of Commons Library. No. 7710

Mansfield, Edward D. dan Etel Solingen. 2010. *Regionalism*. The Annual Review terdapat dalam [polisci.annualreviews.org](http://polisci.annualreviews.org)

*Permanent Court of Arbitration Decision on the South China Sea*. Australia-China Relations Institute, University of Technology, Sydney, on July 2016.

Rehn, Detlef, 2016. *The Philippines Under the New Leadership*. EU-ASIA Economic Governance Forum.

Väyrynen, Raimo. 2003. *Regionalism: Old and New*. Terdapat dalam *International Studies Review*. Vol. 5. Malden: Blackwell Publishing. pp. 25-51.

Yujuico, Emmanuel. 2012. *The Philippines*. London: London School of Economics and Political Science.

### **C. Koran:**

Benny D. Koestanto. “Pernyataan Keras Sang Presiden”. Kompas, 23 Oktober 2016.

“Duterte Caci AS Soal Penjualan Senjata.” Kompas, 04 November 2016.

“Duterte Ucapkan Selamat Tinggal ke AS”, Kompas, 21 Oktober 2016.

“Filipina Panggil Pulang Duta Besar di China”, Kompas, 6 September 2013.

“Manila Tolak Intervensi Dunia”. Kompas, 26 September 2016.

Rene L. Pattiradjawane. “Dilema Keamanan Maritim: Protokol CUES Ubah Status Laut Selatan”. Kompas, 3 Oktober 2016.

#### **D. Internet:**

Biography, *Rodrigo Duterte Biography*, diakses pada <http://www.biography.com/people/rodrigo-duterte-102616>.

Documents on The West Philippine Sea. Statement of the Secretary of Foreign Affairs, 12 Juli 2016. Terdapat dalam <http://www.dfa.gov.ph/documents-on-the-west-philippine-sea>. Diakses pada 30 Januari 2017.

Deutsche Welle. *Filipina Tinggalkan ASEAN dan Mendekat ke Cina*. Terdapat dalam <http://www.dw.com/id/filipina-tinggalkan-asean-dan-mendekat-ke-cina/a-19297934>. Diakses pada 22 Desember 2016.

FilipiKnow, *25 Things You Didn't Know About President Rodrigo Duterte*, diakses pada <http://www.filipiknow.net/rodrigo-duterte/>.

First State of the Nation Address of President Rodrigo Duterte. Terdapat dalam *Arbitration Tribunal Releases Final Award on the South China Sea Case, West Philippine Sea Arbitration Update IX*. Center for International Relations and Strategic Studies, August 2016. Foreign Service Institute of the Philippines.

Ge Honglian dan Chen Dingding. 2016. *Where is Duterte's Foreign Policy Going? A Chinese Perspective*. The Diplomat. Terdapat dalam <http://thediplomat.com/2016/10/where-is-dutertes-foreign-policy-going-a-chinese-perspective/>. Diakses pada 01 Februari 2017.

Jennings, Ralph. *The One Real Foreign Policy Goal of Today's Volatile Philippine*. Terdapat dalam [www.forbes.com/sites/ralphjennings/2016/11/3/philippine-presidents-real-foreign-policy-goal/#19ffacbe60b0](http://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2016/11/3/philippine-presidents-real-foreign-policy-goal/#19ffacbe60b0). Diakses pada 31 Januari 2017.

*Joint Statement of the Republic of the Philippines and the People's Republic of China*, Beijing, 21 Oktober 2016. No. 18. Terdapat dalam <http://www.dfa.gov.ph/newsroom/dfa-releases/10748-joint-statement-of-the-republic-of-the-philippines-and-the-people-s-republic-of-china>. Diakses pada 01 Februari 2017.

Metelitsa, Alexander, dan Jeffrey Kupfer. 2014. *Issue Brief: Oil and Gas Resources and Transit Issues in the South China Sea*. Hal. 2. Terdapat dalam U.S. Energy Information Administration, *International Energy Outlook 2014*, DOE/EIA-0484(2014), <http://www.eia.gov/forecasts/ieo>.

*Nilai Seaborne Trade Laut China Selatan Capai 5,3 T Dolar AS Per Tahun*. 2016. Jurnal Maritim, *Indonesia Maritime Cognition*. Terdapat pada [jurnalmaritim.com/2016/11/nilai-seaborne-trade-laut-china-selatan-capai-53-t-dolar-as-per-tahun/](http://jurnalmaritim.com/2016/11/nilai-seaborne-trade-laut-china-selatan-capai-53-t-dolar-as-per-tahun/). Diakses pada 07 Februari 2017.

Parameswaran, Prashanth. *China, Philippines Mull Coast Guard Cooperation*. Terdapat dalam <http://thediplomat.com/2016/12/china-philippines-mull-new-coast-guard-cooperation/>. Diakses pada 31 Januari 2017.

Pars Today. *Pemerintahan Baru Filipina dan Tantangannya*, dalam <http://parstoday.com/id/radio/world-i14899-pemerintahan-baru-filipina-dan-tantangannya>. Diakses pada 1 Desember 2016.

*Philippine Foreign Policy, Departmen of Foreign Affairs, Republic of the Phiippines*. Terdapat dalam <https://www.dfa.gov.ph/about-us/phl-foreign-policy>. Diakses pada 12 Februari 2017.

Rabena, Aaron. *What a Duterte Government Means for Sino-Philippine Relations*. Terdapat dalam <http://www.rappler.com/views/imho/135568-duterte-government-china-philippines-relations>. Diakses pada 31 Januari 2017.

Rappler, *22 Things to Know About Duterte Harry*, diakses pada <http://www.rappler.com/newsbreak/iq/105955-things-know-trivia-rodrigo-duterte> .

*Rodrigo Roa Duterte President Republic of Philippines*, diunduh dari [https://www.philippineembassy-usa.org%2Fuploads%2FJULY%25202016%2FBio\\_Rodrigo%2520Roa%2520Duterte.pdf&usg=AFQjCNEEE8lbdg3jDhkibj5h8HKp5jCa6Q](https://www.philippineembassy-usa.org%2Fuploads%2FJULY%25202016%2FBio_Rodrigo%2520Roa%2520Duterte.pdf&usg=AFQjCNEEE8lbdg3jDhkibj5h8HKp5jCa6Q)

Rodrigue, Jean-Paul, dan Theo Notteboom. *Global Maritime Routes and Chokepoints*. Terdapat dalam The Geography of Transport System, <http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/appl1en/ch1a2en.html>. Diakses pada 12 Februari 2017.

Rosen, David. *The 6 Political Personality Types*. Campaign and Elections. Terdapat pada <https://www.campaignsandelections.com/campaign-insider/the-6-political-personality-types>. Diakses pada 24 Januari 2017.

*Statement of Secretary Perfecto R. Yasay Jr: Praying for Success in the President's China Visit*. Terdapat dalam <http://www.dfa.gov.ph/newsroom/phl-embassies-and-consulates-news/10695-statement-of-secretary-perfecto-r-yasay-jr-on-the-president-s-china-visit>. Diakses pada 30 Januari 2017.

*Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan*. Terdapat dalam BBC Online, diakses pada 12 Februari 2017.

*South China Sea is a Critical World Trade Route and a Potential Source of Hydrocarbons*. EIA Overview. 07 Februari 2013. Terdapat dalam <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=sc>. Diakses pada 12 Februari 2017.

The Famous People, *Rodrigo Duterte Biography*, diakses dalam <http://www.thefamouspeople.com/profiles/rodrigo-duterte-7713.php>.

*The Philippines' Misguided Plan to Stop South China Sea Tensions*. International Crisis Group, 16 August 2016. Terdapat dalam <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/philippines/philippines-misguided-plan-stop-south-china-sea-tensions>. Diakses pada 12 Februari 2017.

Viray, Patricia Lourdes. *Yasay Reiterates: Duterte will not Deviate from Tribunal Ruling on South China Sea*. Terdapat dalam <http://www.philstar.com/headlines/2016/12/19/1654964/yasay-reiterates-duterte-will-not-deviate-tribunal-ruling-south-china-sea#dMI02yJcWUKvsHoY.99>. Diakses pada 31 Januari 2017.

Xie, Yanmei. 2016. *Landmark South China Sea Ruling Could Revive Negotiations*. International Crisis Group. Terdapat dalam <https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/china/landmark-south-china-sea-ruling-could-revive-negotiations>. Diakses pada 12 Februari 2017.

<http://www.independent.co.uk/news/world/asia/philippines-duterte-war-on-drugs-sexual-abuse-crackdown-human-rights-a7366941.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2016.

#### **E. Dokumen:**

Inaugural Address of Presiden Rodrigo Roa Duterte. Delivered at The Riza Hall, Malacanang Palace, 30 Juni 2016.